

**ANALISIS FIQH SIYASAH TERHADAP HUKUMAN KEBIRI
KIMIA BAGI PEDOFIL
(Studi Perppu Nomor 1 Tahun 2016)**

Skripsi

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-Syarat
Guna Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum (S.H) Dalam Ilmu Syari'ah**

Oleh:

ANGGI APRILIANA

NPM 1721020007

Jurusan Hukum TataNegara (Siyasah Syar'iyyah)



**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG**

1442 H / 2021 M

**ANALISIS FIQH SIYASAH TERHADAP PENGATURAN
HUKUMAN KEBIRI KIMIA BAGI PEDOFIL
(Studi Perppu Nomor 1 Tahun 2016)**

Skripsi

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-Syarat
Guna Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum (S.H) Dalam Ilmu Syari'ah**

Oleh:

ANGGI APRILIANA

NPM 1721020007

Jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah)

Pembimbing I : Drs. H. Mundzir HZ, M.Ag

Pembimbing II : Ahmad Burhanuddin, M.HI

**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1442 H / 2021 M**

ABSTRAK

Kasus kejahatan seksual terhadap anak pada tahun 2016 yang semakin hari semakin meningkat intensitasnya secara signifikan di Indonesia sejak tahun-tahun sebelumnya jelas menjadi keresahan masyarakat serta Negara. Melihat kasus-kasus kejahatan seksual pada anak yang semakin meningkat tak terkendali serta memperhatikan masa depan para anak yang juga merupakan generasi penerusnya bangsa Indonesia ini, akhirnya pada Tahun 2016 pemerintah menerbitkan Perppu No. 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Dalam perubahan kedua tersebut memasukkan hukuman tambahan bagi pelaku kejahatan seksual anak (Pedofil) yang salah satunya ialah hukuman kebiri kimia yang diatur pada Pasal 81 ayat 7. Walaupun pada pelaksanaan hukum kebiri kemudian menimbulkan perbedaan argumentasi dikalangan masyarakat maupun organisasi-organisasi negara.

Berdasarkan latar belakang tersebut, kiranya penulis dapat mengemukakan permasalahan yang diteliti pada penelitian ini ialah Bagaimana Hukuman Kebiri Kimia Berdasarkan Perppu Nomor 1 Tahun 2016? Dan bagaimana analisis *fiqh siyasah* terhadap hukuman kebiri kimia yang ditetapkan berdasarkan Perppu Nomor 1 Tahun 2016 tersebut.

Adapun penelitian ini bersifat kualitatif dan menggunakan jenis penelitian kepustakaan (*library-research*) yang data-datanya berupa data sekunder yang diambil dari buku, bahan bacaan hukum terkait, jurnal-jurnal, sumber online, artikel hukum serta bahan hukum lainnya yang sesuai dengan judul penelitian ini. Penelitian ini menggunakan 2 jenis pendekatan untuk mendapatkan hasil valid yaitu diantaranya pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dan pendekatan perundang-undangan (*statue approach*). Dan metode yang digunakan dalam mengumpulkan bahan hukum ialah penentuan bahan hukum dan *inventarisasi* dokumen, dengan melalui 4 tahap pengolahan data yaitu *editing*, verifikasi data, klasifikasi data dan sistemisasi data.

Hasil penelitian ini diantara ialah menjawab rumusan permasalahan yang dijabarkan dalam penelitian ini yaitu *Pertama*, Hukuman Kebiri Kimia diatur dalam pasal 81 ayat 7 pada Perppu Nomor 1 Tahun 2016 merupakan pidana tambahan guna memberikan pemberatan bagi pelaku kekerasan seksual anak (pedofil). Yang kemudian dijelaskan pada Perppu Nomor 70 Tahun 2020 Tentang Tata cara pelaksanaan tindakan kebiri kimia sebagai wujud kejelasan terhadap aturan hukuman kebiri kimia yang dijelaskan secara universal pada Perppu Nomor 1 Tahun 2016. *Kedua*, melihat proses dan tujuan pengaturan hukuman kebiri kimia tersebut yang mendorong dan telah sesuai kepada kemaslahatan yang merupakan tujuan utama dalam penciptaan sebuah hukum di islam dan kajian *fiqh siyasah*, maka hukuman ini dapat diterima dengan dikategorikan sebagai hukuman *ta'zir* pada *fiqh siyasah* yaitu hukuman yang belum diatur dalam nash atau hukuman had dan bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan umum yang bersifat *Tahsini* (perbaikan) dan guna memberikan efek jera (*zawazir*).

ABSTRACT

Cases of sexual crimes against children in 2016, which are increasing in intensity significantly in Indonesia since the previous years, have clearly become a concern for the community and the State. Seeing cases of sexual crimes against children that are increasing out of control and paying attention to the future of the children who are also the next generation of the Indonesian nation, finally in 2016 the government issued Perppu No. 1 of 2016 concerning the second amendment to Law No. 23 of 2002 concerning Child Protection. In the second amendment includes additional penalties for child sexual offenders (Pedophiles), one of which is the chemical castration penalty which is regulated in Article 81 paragraph 7. Even though the implementation of castration law then raises different arguments among the public and state organizations.

Based on this background, the writer can put forward the problems studied in this study, which is How the Chemical Castration Punishment Based on Perppu No.1 of 2016? And how is the fiqh siyasah analysis of the chemical castration punishment stipulated based on the Perppu No.1 of 2016.

This research is qualitative in nature and uses the type of librarian research (library-research) whose data is in the form of secondary data taken from books, related legal reading materials, journals, online sources, legal articles and other legal materials that match the research title. This study uses 2 types of approaches to obtain valid results, including a conceptual approach and a statue approach. And the methods used in collecting legal materials are the determination of legal materials and document inventory, by going through 4 stages of data processing, namely editing, data verification, data classification and data systemization.

The results of this study include answering the formulation of the problems outlined in this study, namely First, the chemical castration penalty regulated in article 81 paragraph 7 of the Perppu Number 1 of 2016 is an additional punishment to provide weight to perpetrators of child sexual violence (pedophiles). Which is then explained in Perppu Number 70 of 2020 concerning Procedures for the implementation of chemical castration as a form of clarity on the rules for chemical castration which are described universally in Perppu Number 1 of 2016. Second, looking at the process and objectives of the chemical castration penalty regulation that encourages and has In accordance with the benefit which is the main goal in creating a law in Islam and the study of fiqh siyasah, then this punishment can be accepted as being categorized as ta'zir punishment in fiqh siyasah, which is a punishment that has not been regulated in the text or punishment had and aims to realize the general benefit that is has the character of Tahsini (improvement) and in order to provide a deterrent effect (*zawazir*).

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Anggi Apriliana

NPM : 1721020007

Jurusan/Prodi : Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah)

Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **“Analisis Fiqh Siyasah Terhadap Hukuman Kebiri Kimia Bagi Pedofil (Studi Perppu Nomor 1 Tahun 2016)”** adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam *footnote* atau daftar pustaka. Apabila dilain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung, Februari 2021
Penulis,

Anggi Apriliana
Npm.1721020007



**KEMENTERIAN AGAMA
UIN RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat : Jl. Let. Kol. H. Suratmin Sukarama 1 Bandar Lampung Telp (0721) 703260

PERSETUJUAN

Tim pembimbing telah membimbing dan mengoreksi skripsi
sebagaimana mestinya terhadap saudara :

Nama : Anggi Apriliana
NPM : 1721020007
Fakultas : Syariah
Jurusan : Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iiyyah)
**Judul Skripsi: Analisis Fiqh Siyasah Terhadap Hukuman Kebiri
Kimia Bagi Pedofil (Studi Perppu Nomor 1 Tahun
2016)**

MENYETUJUI

Untuk dimunaqasyahkan dan dipertahankan dalam sidang Munaqasyah
Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

Bandar Lampung, 3 Desember 2020

Pembimbing I

Pembimbing II

Drs. H. Mundzir HZ, M.Ag
NIP. 195607271988031001

Ahmad Burhanuddin, M.HI
NIR. 2019040119921214002

**Mengetahui,
Ketua Jurusan**

Frenki, M.Si
NIP. 198003152009011017



**KEMENTERIAN AGAMA
UIN RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat : Jl. Let. Kol. H. Suratmin Sukarame I Bandar Lampung Telp (0721) 703260

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul “Analisis Fiqh Siyasah Terhadap Hukuman Kebiri Kimia Bagi Pedofil (Studi Perppu Nomor 1 Tahun 2016)”, disusun oleh Anggi Apriliana NPM 1721020007 Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah Syar’iyyah). Telah diujikan dalam sidang Munaqasyah di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Lampung, pada Hari/Tanggal : Rabu, 17 Maret 2021.

TIM PENGUJI

Ketua : Frenki, M.Si

(.....)

Sekretaris : Hendriyadi, S.H.I, M.H.I.

(.....)

Penguji I : Agustina Nurhayati, S.Ag, M.H.

(.....)

Penguji II : Drs. H. Mundzir HZ, M.Ag

(.....)

Penguji III : Ahmad Burhanuddin, M.H.I

(.....)



**Mengetahui,
Dekan Fakultas Syariah**

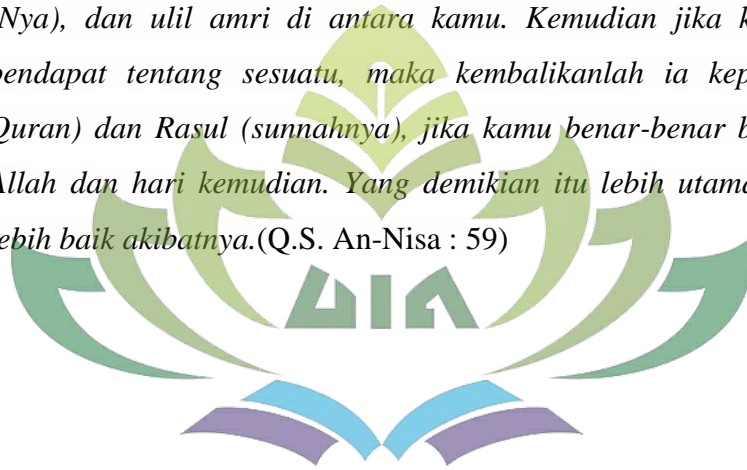
Dr. A. Khairuddin, M.H.

NIP. 196210221993031002

MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ ۖ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya. (Q.S. An-Nisa : 59)



PERSEMBAHAN

Puji syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan berkah dan ridho nya sehingga skripsi ini dapat terselesaikan oleh penulis. Solawat serta salam tidak lupa selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW.

Skripsi ini saya persembahkan kepada :

1. Kedua orang tua tercinta, Ayahanda M. Romli dan Ibunda Lina Afriyana yang senantiasa memberikan doa, pengertian, dukungan dan motivasinya yang tiada henti dan sangat berharga hingga tak ternilai, yang senantiasa menjadi support system nomor 1 saya, terutama Mama saya tercinta, dan Papa saya yang tidak henti bekerja keras hingga tua untuk melihat anak bungsunya mendapatkan gelar sarjana
2. Kepada diri saya sendiri yang telah berusaha keras dan berjuang serta pantang menyerah sehingga saya bisa menyelesaikan skripsi ini dengan baik
3. Kepada kakak satu-satunya yang terkasih dan saya sayangi, Angga Kurniawan, yang telah berjuang dan berusaha bekerja sedemikian keras hingga adiknya mendapat gelar ini
4. Almamater tercinta, UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG yang telah membantu mendidik dan memberikan ilmu serta wawasan yang luar biasa

RIWAYAT HIDUP

Anggi Apriliana, Lahir pada tanggal 9 April 1999 di Bandar Lampung, yang merupakan anak kedua dari dua bersaudara. Anak dari pasangan Bapak M. Romli dan Ibu Lina Afriyana. Beralamat di Jalan Pulau Singkep, Perumahan Zhafira Permai Blok B, Sukabumi, Bandar Lampung.

1. Penulis menempuh pendidikan Taman Kanak-Kanak di TK AN-NUR pada Tahun 2004. Selama menjalani pendidikan di TK AN-NUR, penulis sering terlibat dalam kegiatan tari dan mewarnai.
2. Kemudian penulis melanjutkan pendidikan ke tingkat Sekolah Dasar di SDN 1 SUKAMAJU pada Tahun 2005. Pada jenjang ini penulis mulai aktif mengikuti kegiatan ekstra seperti menari, voli dan grup music.
3. Penulis melanjutkan ke jenjang Sekolah Menengah Pertama di SMPN 3 BANDAR LAMPUNG pada Tahun 2011. Penulis mengikuti cukup banyak ekstrakurikuler pada jenjang ini seperti English Club, Voli Club, Art Club, Karya Ilmiah Remaja (KIR), dan Paskibra.
4. Penulis menjalankan jenjang Sekolah Menengah Atas di SMA PERINTIS 1 BANDAR LAMPUNG. Pada jenjang ini, penulis terlibat pada kegiatan OSIS dan menjadi Ketua Ekstrakurikuler Sastra.
5. Lalu pada tahun 2017, penulis melanjutkan pendidikan di UIN RADEN INTAN LAMPUNG pada Jurusan Hukum Tata Negara.

Bandar Lampung, Februari 2021

Penulis,

Anggi Apriliana

Npm.1721020007

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum wr.wb.

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah Swt yang telah memberikan karunia, ridho serta ilmu-Nya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul, “Analisis Fqih Siyasah Terhadap Pengaturan Hukuman Kebiri Bagi Pedofil Berdasarkan Perppu Nomor 1 Tahun 2016” dengan baik. Solawat serta salam juga selalu penulis curahkan kepada Baginda Nabi Muhammad SAW dengan para sahabat-sahabatnya. Skripsi ini ditulis dan diselesaikan guna untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum pada jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah Syar’iyyah) di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tentunya tidak mungkin dapat diselesaikan dengan baik tanpa adanya bimbingan, bantuan, kritik, saran, motivasi, fasilitas dan kesempatan yang diberikan. Untuk itu penulis mengucapkan terima kasih kepada para pihak yang telah berkontribusi dalam keberhasilan penyelesaian skripsi ini. Rasa hormat dan terimakasih juga penulis sampaikan kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Mukri, M.Ag, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung
2. Bapak Dr. KH. Khairuddin Tahmid, M.H., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung
3. Bapak Frenki, M.Si, selaku Ketua Jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah Syar’iyyah) dan Bapak Hervin Yoki Pradikta, M.H.I selaku Sekertaris Jurusan Hukum Tata Negara di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung
4. Bapak Drs. H. Mundzir HZ, M.Ag. dan Bapak Ahmad Burhanuddin, M.HI, Selaku Pembimbing I dan Pembimbing II yang luar biasa memberikan bantuan dan motivasinya dalam proses skripsi
5. Seluruh Dosen-Dosen dan Staf Fakultas Syariah yangtelah memberikan pengarahan selama proses perkuliahan

6. Kedua Orang Tua, Ayahanda (M. Romli) dan Ibunda (Lina Afriyana) dan kakak tercinta (Angga Kurniawan) yang selalu memberikan yang paling terbaik kepada anaknya
7. Partner Skripsi yang juga teman sejawat, Cindy Rizki Wulandari yang sudah berproses berjuang bersama dalam menempuh skripsi ini sejak awal
8. Teman-teman sejawat seangkatan terutama teman-temanku tersayang Hani Trianara dan Riska Restiana yang telah mengisi hari-hari kuliah saya sejak semester satu dan Hukum Tata Negara Kelas B Angkatan 2017 terima kasih banyak atas perhatian, waktu, candaan, keseruan dan kenangan yang luar biasa dan kehangatan seperti keluarga yang telah diberikan selama menjalani perkuliahan
9. Pegawai perpustakaan pusat dan Fakultas Syariah yang telah menyediakan waktu dan fasilitas dalam rangka pengumpulan data
10. Almamater tercinta Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

Atas bantuan berbagai pihak yang telah disebutkan maupun yang belum disebutkan penulis mengucapkan terimakasih dan semoga kebaikan kembali kepada kalian semua. Amin.

Kemudian penulis juga menyadari adanya kekurangan terhadap skripsi yang penulis telah susun ini, hal tersebut karena keterbatasan kemampuan, waktu dan referensi yang dimiliki. Oleh karena itu, untuk kiranya dapat memberikan saran dan kritik guna melengkapi skripsi ini.

Semoga skripsi ini dapat berguna, bermanfaat serta menambah wawasan mahasiswa/i khususnya fakultas syariah juga dapat menjadi tambahan wawasan referensi bagi masyarakat dalam bidang hukum.

Wassalamualaikum wr.wb.

Bandar Lampung, Februari 2021

Penulis,

Anggi apriliana
Npm.1721020007

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERNYATAAN	iv
PERSETUJUAN.....	Error! Bookmark not defined.
PENGESAHAN	Error! Bookmark not defined.
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN.....	viii
RIWAYAT HIDUP	ix
KATA PENGANTAR.....	x
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Penegasan Judul.....	1
B. Latar Belakang Masalah	3
C. Fokus Penelitian	11
D. Rumusan Masalah.....	11
E. Tujuan Penelitian.....	12
F. Manfaat Penelitian	12
G. Tinjauan Pustaka.....	13
H. Metode Penelitian	16
BAB II LANDASAN TEORI	22
A. Fiqh Siyasah	22
B. Pedofil (Pedofilia).....	29
C. Kebiri Dalam Islam	36
D. Opini Terhadap Hukuman Kebiri Kimia	41
BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN	57
A. Gambaran Umum Kebiri	57
1. Sejarah Kebiri (Kastrasi).....	57
2. Penerapan Hukuman Kebiri Kimia.....	63
B. Deskripsi Data Penelitian	73
1. Historitas Pengaturan Hukuman Kebiri Kimia Di Indonesia	73
2. Perubahan Peraturan Perlindungan Anak Di Indonesia.....	81
3. Regulasi Pelaksanaan Tindakan Hukuman Kebiri Kimia (Perppu Nomor 70 Tahun 2020).....	98

BAB IV ANALISIS PENELITIAN	104
A. Hukuman Kebiri Kimia Berdasarkan Perppu Nomor 1 Tahun 2016	104
B. Analisis Fiqh Siyasah Terhadap Pengaturan Hukuman Kebiri Kimia Bagi Pedofil Berdasarkan Perppu Nomor 1 Tahun 2016	106
BAB V PENUTUP.....	118
A. Simpulan.....	118
B. Rekomendasi	119
DAFTAR PUSTAKA	121
LAMPIRAN-LAMPIRAN	129



DAFTAR LAMPIRAN

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016
Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002
Tentang Perlindungan Anak

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 70 Tahun 2020
Tentang Tata Cara Pelaksanaan Tindakan Kebiri Kimia, Pemasangan Alat
Pendeteksi Elektronik, Rehabilitasi serta Pengumuman Identitas Pelaku Pelaku
Kekerasan Seksual Terhadap Anak



BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Untuk memfokuskan pemahaman kita agar tidak lepas dari pembahasan yang dimaksud dan menghindari penafsiran yang berbeda atau bahkan salah dikalangan pembaca, maka perlu adanya penjelasan dengan memberi arti beberapa istilah yang terkandung dalam judul penelitian ini. Adapun judul penelitian ini adalah **“Analisis Fiqh Siyasah Terhadap Hukuman Kebiri Kimia Bagi Pedofil (Studi Perppu Nomor 1 Tahun 2016)”**.

Terdapat beberapa istilah di dalam judul penelitian inidan penulis merasa perlu untuk diuraikan adalah sebagai berikut :

1. **Analisis** ialah suatu penguraian atas berbagai bagian dan penelaahan bagian itu sendiri serta hubungan antar bagian yang tepat dan pemahaman arti keseluruhan, kupasan mengenai suatu soal.¹
2. **Fiqh Siyasah** adalah Ilmu yang mempelajari tentang seluk-beluk pengaturan umat dan negara dengan segala bentuk hukum, peraturan dan kebijakan pemerintah yang sejalan dengan dasar ajaran untuk mewujudkan ke-*maslahatan* umat.²

¹ Rudi Erwin, *Kamus Hukum*, (Jakarta: Sinar Garfika, 2000), 8.

² Nurhayati, Ali Imran Sinaga, *Fiqh dan Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2018), 187.

3. **Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPPU)**

Nomor 1 Tahun 2016 adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh presiden sebagai perubahan kedua dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.³

4. **Pedofil** adalah orang yang mengidap penyakit Pedofilia yakni gangguan seksual yang berupa hasrat ketertarikan seksualitas (keintiman) terhadap anak dibawah umur.⁴

5. **Kebiri Kimia** adalah tindakan menyuntikkan cairan kimiawi yang memusnahkan libido seksual seseorang.⁵

Maka dapat disimpulkan bahwasanya maksud dari judul penelitian Ini **“Analisis Fiqh Siyasah Terhadap Hukuman Kebiri Kimia Bagi Pedofil (Studi Perppu Nomor 1 Tahun 2016)”** ialah menganalisis tentang kebijakan pemerintah dalam penetapan hukuman kebiri kimia bagi para pedofil berdasarkan Perppu No. 1 Tahun 2016 dalam perspektif disiplin ilmu *Fiqh Siyasah*.

³ Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Pasal 1 angka 4.

⁴ Thamiep, “Definisi Pedofilia”, dalam *Id.Scribd*, Juli 10, 2015, <https://id.scribd.com/doc/94107015/Definisi-pedofilia-pedofil> , diunduh pada tanggal 29 April 2020

⁵ Insan Medika, “Menenal hukuman kebiri kimia permanen dan kebiri kimia beserta dampaknya pada kesehatan”, dalam *Insanmedika*, Januari 20, 2016, <https://blogs.insanmedika.co.id/hukum-kebiri-adalah/amp> diundah pada tanggal 30 April 2020

B. Latar Belakang Masalah

Pada 25 Mei 2016, Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo menyatakan bahwa kejahatan seksual terhadap anak sebagai kejahatan luar biasa dikarenakan maraknya jumlah intensitas kejahatan seksual terhadap anak yang terus terjadi yaitu hingga mencapai 625 kasus.⁶ Kejahatan seksual terhadap anak ini terus saja mengancam dan membahayakan jiwa, mental dan psikis serta masa depan bagi anak. Sebenarnya, terkait pemidanaan atau hukuman terkait kejahatan seksual terhadap anak ini telah diatur dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Akan tetapi rupanya, pemidanaan yang telah diatur dalam perundang-undangan tersebut tidak memberikan efek jera yang signifikan bagi pelaku kejahatan seksual terhadap anak (pedofil) apabila melihat dari kasus yang masih terus meningkat terjadi. Oleh karena itu, Presiden kemudian mengeluarkan perintah untuk merevisi kembali Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 dan kemudian sampai pada keputusannya diterbitkannya PERPPU No. 1 Tahun 2016 sebagai peraturan untuk mengatur penambahan dan pemberatan pidana bagi para pedofil dan mencegah para calon pelaku pedofil.

Kemudian dalam Perppu No. 1 Tahun 2016 tersebut, diatur mengenai pidana tambahan bagi pelaku Pedofilia yaitu berupa pengumuman identitas, pelaksanaan kebiri kimia dan pemasangan alat pendeteksi

⁶Riyan Ferdianto, “2016 tahun darurat nasional kejahatan seksual anak”, dalam *Med.com* (Jakarta, 2016), <https://m.medcom.id/amp/1bVY2gaN-2016-tahun-darurat-nasional-kejahatan-seksual-anak>, diunduh pada tanggal 30 April 2020)

elektronik yang disebutkan dalam Pasal 81. Hukuman kebiri kimia sendiri berawal dari dorongan dan usul dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), Kementerian Sosial, Kementerian Kesehatan, dan Kementrian Pendidikan Nasional.⁷ Lembaga-lembaga tersebut beranggapan bahwa hukuman tersebut diharapkan dapat memberikan efek jera yang maksimal bagi pelaku pedofil dan mencegah calon pelakupedofil melakukan hal serupa.

Istilah Kebiri sendiri dalam dunia Kedokteran didefinisikan sebagai suatu tindakan yang dilakukan untuk menghilangkan fungsi testis dan/atau hormon testosteron yang berkaitan dengan ketertarikan pada lawan jenis dalam hal seksualitas. Kebiri sendiri dapat dilakukan dengan 2 cara yaitu *pertama*, tindakan pembedahan yakni pengangkatan (amputasi) testis sebagai tempat produksi hormon testosteron. Cara ini sudah lama ditinggalkan di era modern ini karena dinilai sangat menentang hak asasi manusia (HAM). Kedua, kebiri kimia yakni menyuntikkan cairan kimiawi yang memusnahkan libido seksualnya. Kedua model kebiri ini sama-sama berdampak pada lumpuhnya fungsi organ vital laki-laki dan menghilangnya dorongan seksualitas orang tersebut.⁸

⁷Yudistira Imandiar, "Peluru kebiri untuk predator", dalam *Detik.com*, Juni 9, 2016, <https://news.detik.com/x/detail/investigasi/20160609/peluru-kebiri> diunduh pada tanggal 30 April 2020

⁸Gloria Setvani Putri, "Mengenal kebiri kimia, hukuman bagi pelaku perkosaan", dalam *Kompas.com*, Agustus 26, 2019, <https://kompas.com/sains/read/2019/08/26/112402523/mengenal-kebiri-kimia-hukuman-bagi-pelaku-perkosaan> diunduh pada tanggal 30 April 2020

Dalam syari'at Islam (Hukum Islam) sendiri tidak mengenal adanya hukuman kebiri. Hanya saja ada penyebutan tentang pelarangan terkait pengebirian yang tercantum dalam hadist Rasulullah Saw :

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ الْهَمْدَانِيُّ: حَدَّثَنَا أَبِي وَوَكَيْعٌ وَابْنُ بَشِيرٍ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ قَيْسٍ قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ يَقُولُ: كُنَّا نَعْزُو مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ لَيْسَ لَنَا نِسَاءٌ. فَقُلْنَا: أَلَا نَسْتَخْصِي؟ فَهَانَا عَنْ ذَلِكَ،⁹

“Muhammad bin ‘Abdullah bin Numair Al-Hamadani telah menceritakan kepada kami: Ayahku, Waki’, dan Ibnu Bisyr menceritakan kepada kami, dari Isma’il, dari Qais, beliau mengatakan: Aku mendengar ‘Abdullah mengatakan: Kami pernah pergi berperang bersama Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam dan kami tidak membawa serta para istri. Kami bertanya: Bolehkah kami mengebiri diri kami? Namun beliau melarang kami dari hal itu,...” (HR. Muslim nomor 1404)

Hadist lain juga telah menyebutkan yaitu Sa’ad bin Abi Waqqash radhiyallahu ‘anhu pernah berkata,

رَدَّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى عُثْمَانَ بْنِ مَطْعُونٍ التَّبَّطُلَ ، وَلَوْ أَذِنَ لَهُ لَاخْتَصَيْنَا¹⁰

“Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam tidak mengizinkan ‘Utsman bin Mazh’un untuk tabattul (hidup membujang), kalau seandainya beliau mengizinkan tentu kami (akan bertabattul) meskipun (untuk mencapainya kami harus) melakukan pengebirian.” (HR. Bukhari no. 5073 dan Muslim no. 1402)

⁹ Imam Muslim, *Kitab Shahih Muslim*, (Makassar: Maktabah Fayyadh), hadist nomor 1404, pratinjau melalui [egoogole.book.id](https://www.google.com/books?id=...) pada tanggal 30 April 2020

¹⁰ “Hadist Bukhari dan Muslim”, pratinjau melalui <https://tafsirq.com/> diunduh pada tanggal 30 April 2020

Apabila menilik lebih jauh terkait hukuman kebiri kimia, hukuman ini sendiri sebenarnya sudah diterapkan di beberapa negara seperti Korea Selatan, Australia, Amerika Serikat, Polandia, Moldova, Kazakhstan, Inggris, dan beberapa bagian Uni Eropa. Menurut pengamatan yang dilakukan oleh *Institute For Criminal Justice Reform (ICJR)*, negara yang menjadikan hukuman kebiri kimia menjadi hukuman wajib hanyalah minoritas yaitu Amerika Serikat, sebagian kecil Uni Eropa, Kazakhstan, Polandia dan Moldova. Sedangkan, Korea Selatan menjadikan hukuman kebiri kimia sebagai *discretionari* (opsi/tambahan). Dan Australia, Inggris, serta Jerman menjadikan hukum kebiri kimia sebagai *Voluntary* yakni tindakan tersebut mutlak harus berdasarkan persetujuan pelaku.¹¹

Dalam perjalanannya terkait penetapan dan pengaturan mengenai Hukuman Kebiri Kimia berdasarkan Perppu Nomor 1 Tahun 2016, Pemerintah sendiri telah mengalami beberapa penolakan terhadap dikeluarkannya kebijakan tersebut. Ada beberapa yang menentang kebijakan pengaturan Hukuman Kebiri Kimia dikarenakan dianggap tidak sejalan dengan prinsip menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia (HAM), tidak relevan dengan Hukum Islam yang dianut oleh mayoritas warga negara Indonesia yang beragam Muslim, dan lain sebagainya. Hukuman kebiri juga dianggap dapat memberikan dampak buruk bagi korban terutama pada kesehatannya. Banyaknya kalangan yang menentang penerbitan

¹¹Zaki Mubarak, "Selain Indonesia, ini negara yang telah menerapkan hukuman kebiri kimia untuk para pedofil", dalam *Serambinews.com*, Agustus 26, 2019, <https://aceh.tribunnews.com/amp/2019/08/26-> diunduh pada tanggal 30 April 2020

pengaturan hukuman kebiri kimia ini didominasi dari organisasi-organisasi Hak Asasi Manusia (HAM).

Meski begitu pemerintah tetap pada keputusannya untuk mengeluarkan kebijakan mengenai pengaturan Hukuman Kebiri Kimia sebagai pidana tambahan bagi Pedofil karena melihat keurgensian kasus Pedofilia yang meningkat saat itu. Menurut Dewan Perwakilan Rakyat pun kebijakan pemerintah terkait pengaturan Hukuman Kebiri Kimia sebagai pidana tambahan ini memang perlu dilakukan sebagai tindakan responsif dan preventif terhadap kasus Pedofilia yang berkembang diluar kendali, karena akibat yang disebabkan dari kasus Pedofilia sangatlah besar dan berkepanjangan bagi korban.¹²

Menurut Ketua komisi pertama Majelis Ulama Indonesia (MUI), Hasanudin AF, dalam pandangan Islam, Hasanudin mengatakan hukuman kebiri termasuk kedalam hukum *ta'zir* atau hukum tambahan yang mana *hukum ta'zir* itu boleh dikeluarkan dan diserahkan sepenuhnya kepada kebijakan pemerintah.¹³

Beberapa ulama di Indonesia ada juga yang berpendapat bahwasanya Hukuman Kebiri ini boleh saja dilakukan karena mengedepankan *kemaslahatan mursahal* yaitu hukum yang ditetapkan berdasarkan

¹²Syamsi Huda, "Dpr dukung hukuman kebiri", dalam *Merdeka.com*, September 8, 2016, <https://m.merdeka.com/peristiwa/dpr-dukung-hukum-kebiri> diunduh pada tanggal 30 April 2020

¹³ Hasil wawancara Hasanudin AF pada surat kabar harian republik, dalam *Republika.co.id*, Mei 16, 2017, <https://republika.co.id/berita/nasional/jabodetabek-nasional/16/05/17-> diunduh pada tanggal 30 April 2020

prinsip mendatangkan *kemaslahatan* yang diperlukan oleh masyarakat¹⁴, dalam hal ini membantu mencegah tindakan Pedofilia. Dalam *ushul fiqh* sendiri mengkategorikan *maslahat mursalah* menjadi 3 tingkatan yaitu *Maslahah dharuriah* (primer), *Maslahah hajjiyah* (sekunder), dan *Maslahah Tasniyah* (tersier).¹⁵ Dan hukuman kebiri kimia ini bisa diterapkan dikarenakan merupakan tergolong *maslahah dharuriyah* yaitu kemaslahatan untuk terwujudnya kehidupan manusia yang baik dan esensial serta mutlak yang apabila tidak dipenuhi maka akan menimbulkan kerusakan.

Pada tanggal 25 Mei Tahun 2016 pemerintah secara resmi tetap menerbitkan Perppu Nomor 1 Tahun 2016 yang mengatur juga mengenai Hukuman Kebiri Kimia bagi pelaku Pedofilia, meski dinilai kurang sejalan dengan prinsip HAM dan Hukum Islam, akan tetapi Pemerintah merasa keresahan terhadap keurgensian kasus Pedofilia ini menjadikan dasar utama diharuskannya pengaturan mengenai Hukuman kebiri kimia diterbitkan guna memaksimalkan efek jera bagi para pelaku dan calon pelaku serta dengan harapan dapat memutus terciptanya rantai pelaku Pedofilia lainnya yang dilatarbelakangi oleh riwayat pernah menjadi korban kasus serupa.¹⁶

¹⁴ Maimun, *Ushul Fiqh II : Metode Penemuan Hukum Dan Impelentasinya*, (BandarLampung: Anugraha Utama Raharja (AURA), 2019), Cet.VI, 57.

¹⁵ Hamka Haq, *Falsafat Ushul Fiqh*, (Ujung Pandang: Yayasan Al-Ahkam, 1998), 76.

¹⁶ Kevin Setiawan, Aji Wibowo, “Analisis penerapan penjatuhan sanksi tindakan kebiri kimia dari sudut pandangan hak asasi manusia pelaku dan korban”, *Jurnal Hukum Adigama*, Vol 2, no. 1, (2019),

Apabila kebijakan tersebut dikatakan tidak relevan dengan Hukum Islam, maka hal tersebut erat kaitannya mengenai pandangan *Fiqh Siyasah* dalam kebijakan tersebut. Memang dalam historitas *Fiqh Siyasah* maupun Politik Hukum Islam tidak pernah ada kasus yang menerapkan hukuman berupa pengembirian pada manusia. Akan tetapi, dalam prinsip *Fiqh Siyasah* sendiri menganggap bahwasanya “Setiap hukum yang dibuat dengan mengedepankan suatu *Maqashid asy-syari'ah* dianggap jelas harus didukung, karena penerapan *Maqashid asy-syari'ah* dalam proses *istinbath al-ahkam* dinilai penting agar produk hukum yang dihasilkan tidak bergeser dari tujuan asasinya, yaitu menebar kemaslahatan dan menangkal terjadinya kemudharatan.¹⁷ Apabila kita membicarakan mengenai *Maqashid Syari'ah* sendiri, pada hakikatnya *Maqashid Syari'ah* memiliki 3 tujuan menurut syekh Muhammad Abu Zahra yaitu Membina setiap individu menjadi sumber kebaikan, menegakkan keadilan, dan merealisasikan kemaslahatan.¹⁸ *Maqashid syari'ah* juga terdiri dari 5 unsur umum yaitu memelihara agama (*hifdz al-din*), memelihara jiwa (*hifdz al-nafs*), memelihara akal (*hifdz al-aql*), memelihara keturunan (*hifdz an-nasl*), dan memelihara harta (*hifdz al-mal*).¹⁹ Dalam *Fiqh Siyasah* suatu kebijakan tersebut haruslah memenuhi beberapa prinsip yakni Keadilan, Musyawarah, *Musawah*, *Maslahat*, *Kedaulatan*, *Amar Ma'ruf Nahi*

<https://journal.untar.ac.id/index.php/adigama/article/download>, diunduh pada tanggal 30 April 2020

¹⁷ Abu Yasid, *Logika Ushul Fiqh*, (Yogyakarta: IRCiSoD, 2019), h.57.

¹⁸ Sapiudin Shiddiq, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2017), h.223-224.

¹⁹ Iwan Hermawan, *Ushul Fiqh: Metode Kajian Hukum Islam*, (Kuningan: Hidayatul Al-Qur'an, 2019), h.50-52.

Munkar, Persatuan, Kebebasan, dan Bijaksana serta Rasional.²⁰ Dan disebutkan juga dalam Buku *Fiqh Siyasah* oleh Prof.H.A.Djazuli bahwasanya *Fiqh Siyasah* bukan hanya menjalankan fungsi pelayanan (*khidmah*), melainkan juga menjalankan fungsi *ishlah* yaitu fungsi mengarahkan, menghilangkan kerusakan, membawa keharmonisan dan menciptakan perdamaian.²¹ Sehingga meskipun jika suatu kebijakan atau produk hukum diciptakan atau dikeluarkan oleh pemerintah itu kurang relevan dalam Hukum Islam (pengebirian), *Fiqh Siyasah* memandang suatu produk hukum tetap dapat diterima dan diberlakukan apabila mengedepankan *Kemaslahatan*, memenuhi prinsip dan karakteristik *Siyasah* serta menjalankan fungsinya bukan hanya *khidmah* tetapi juga fungsi *ishlah*. Selain itu, penyebutan terkait *hukuman ta'zir* juga dibahas dalam kajian *Fiqh Siyasah*, dan jika penerapan hukuman kebiri kimia ini disandingkan dengan *hukuman ta'zir*, maka hal tersebut dapat diterima pelaksanaannya dalam pandangan kajian *Fiqh Siyasah*.

Dalam hal ini pemerintah dapat menganggap bahwa pengaturan tentang Hukuman Kebiri Kimia bisa saja dikategorikan sebagai kebijakan pemerintah yang menjalankan *fungsi islah*, yang mana memperbaiki kerusakan yaitu yang dimaksud adalah para korban Pedofilia, kemudian menciptakan rasa damai bagi para anak dibawah umur serta memang

²⁰ Mutiara Fahmi, "Prinsip Dasar Politik Hukum Islam Dalam Persepektif Al-Qur'an", *Jurnal Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry*, Vol. 2, no. 1, (2017) : 53, <https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/petita/article/download/1814/1352>, diunduh pada tanggal 2 Mei 2020)

²¹ A.Djazuli, *Fiqh Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syariah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013), 14.

dikeluarkannya kebijakan ini murni untuk kemaslahatan bersama (*Maslahah Murshalah*), serta kebijakan ini dirasa juga tidak menyimpang jauh daripada prinsip *Fiqh Siyasah* yang menyebutkan bahwasanya suatu produk hukum baru dapat diterima disuatu negara apabila sesuai dengan prinsip-prinsip syariat islam, norma dan nilai, mengedepankan kemaslahatan umat serta menjunjung tinggi hak manusia paling asasi.²²

Dari permasalahan dan penjelasan diatas maka adanya pengaturan hukuman kebiri kimia di Indonesia bagi Pelaku kejahatan seksual terhadap anak (pedofil) menarik untuk diteliti dan dikaji oleh penulis serta menambahkan penganalisisan dalam Perspektif *Fiqh Siyasah*.

C. Fokus Penelitian

Fokus penelitian pada judul ini melihat seperti apa hukuman kebiri kimia yang diatur pada Perppu Nomor 1 Tahun 2016. Kemudian bagaimana analisis *Fiqh Siyasah* terhadap adanya kebijakan pengaturan Hukuman Kebiri Kimia bagi para pedofil berdasarkan Perppu Nomor 1 Tahun 2016 tersebut.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang masalah serta fokus penelitian diatas, maka penulis membuat rumusan masalah pada judul ini sebagai berikut :

²²Majar Ibnu Syarif, Khammi Zada, *Fiqh Siyasah: Doktrin dan Pemikiran Politik Islam*, (Jakarta: Erlangga, 2009), 18.

1. Bagaimana Hukuman Kebiri Kimia Berdasarkan Perppu Nomor 1 Tahun 2016?
2. Bagaimana Analisis *Fiqh Siyasah* terhadap Hukuman Kebiri Kimia bagi Pedofil berdasarkan Perppu Nomor 1 Tahun 2016?

E. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini ialah sebagai berikut :

1. Untuk melihat seperti apa hukuman kebiri kimia yang diatur pada Perppu Nomor 1 Tahun 2016
2. Untuk mengetahui bagaimana Analisis *Fiqh Siyasah* terhadap Hukuman Kebiri Kimia bagi Pedofil berdasarkan PERPPU Nomor 1 Tahun 2016 tersebut

F. Manfaat Penelitian

Adapun kegunaan yang dapat penulis sajikan dalam judul ini diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Secara Teoritis

Secara teoritis kegunaan dari penelitian ini ialah diharapkan dapat memberikan pengetahuan berupa konsep-konsep atau referensi baru terkait pemahaman peraturan Hukuman Kebiri Kimia yang dapat diimplementasikan dan bermanfaat bagi masyarakat.

2. Secara Praktis

Secara praktis kegunaan penelitian ini ialah diharapkan dapat memberikan ilmu serta penambahan referensi kajian penelitian lainnya khususnya dalam bidang ilmu ketatanegaraan sehingga berfungsi untuk

mengetahui bagaimana analisis *Fiqh Siyasah* terhadap adanya Hukuman Kebiri Kimia bagi pedofil berdasarkan Perppu Nomor 1 Tahun 2016.

G. Tinjauan Pustaka

Setelah peneliti melakukan telaah terhadap beberapa penelitian, ada beberapa penelitian yang memiliki keterkaitan dengan penelitian yang peneliti lakukan. Penelitian *pertama* yang berhasil peneliti temukan ialah penelitian yang dilakukan oleh Dirga Santosa pada tahun 2017 dalam Skripsinya yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPPU) Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Hukuman Kebiri Kimia”. Tujuan dari penelitian tersebut ialah untuk mengetahui bagaimana Perppu Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Hukuman Kebiri Kimia apabila ditinjau dari perspektif Hukum Islam. Dalam penelitian ini, peneliti juga ingin melihat apa saja yang menjadi dasar pertimbangan pemerintah dalam menerbitkan Perppu Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Hukuman Kebiri Kimia tersebut. Penelitian ini merupakan kategori penelitian pustaka (*Library research*) dengan menggunakan metode penelusuran bahan-bahan literatur yang terkait dengan kajian Hukuman Kebiri Kimia tersebut. Hasil dari penelitian ini memperlihatkan bahwa penerbitan Perppu Nomor 1 Tahun 2016 didasarkan pada kurang efektifnya peraturan sebelumnya dalam menekan angka jera bagi pelaku, selain itu dalam penelitian ini menyimpulkan Hukuman Kebiri Kimia dalam Hukum Islam dinilai haram dan tidak bisa diterapkan karena

hukuman mengenai perbuatan tersebut sudah diatur dalam Islam dan pengebirian pada manusia dengan hormone esterogen dianggap dapat menyebabkan perubahan fisik pada pria yang mana hal tersebut dilarang dalam Islam.²³

Penelitian *kedua* yang berhasil peneliti temukan ialah penelitian yang dilakukan oleh Safyan Ilyas pada tahun 2018 yang berjudul “Sanksi Kebiri Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Pidana Indonesia”. Penelitian ini dibuat untuk melihat efektivitas sanksi kebiri yang dituangkan dalam Perppu No 1 Tahun 2016 berdasarkan sudut pandang Hukum Islam dan Hukum Pidana Indonesia dalam kasus kekerasan seksual terhadap anak. Penelitian Ilyas menggunakan penelitian kepustakaan dengan pendekatan normatif yuridis dan menggunakan metode *comparative content analysis* yang diambil dari Sumber-sumber kajian hukum terkait.

Hasil dari penelitian ini menjelaskan bahwa dalam pandangan Hukum Islam dan Hukum Pidana sendiri sanksi kebiri ini memang cukup diperlukan untuk kemaslahatan bersama dan memberi efek jera bagi para pelaku Pedofilia sebagai bentuk pertanggungjawaban atas perbuatannya.²⁴

Penelitian *ketiga*, yaitu penelitian yang dilakukan oleh Rurialwan Pawana pada Tahun 2020 yang berjudul “Analisis Sanksi Kebiri Kimia Dalam Perspektif Perlindungan Anak”. Penelitian ini melihat pengaruh

²³ Dirga Santosa, “Tinjauan Hukum Islam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPPU) Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Hukuman Kebiri Kimia”, (Skripsi: UIN Raden Intan Lampung, Lampung, 2017)

²⁴ Safyan ilyas, “Sanksi Kebiri Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Pidana Indonesia”, (Tesis: Institut Agama Islam Negeri Bengkulu, Bengkulu, 2018)

pemberian sanksi kebiri kimia bagi kasus kekerasan seksual terhadap anak dalam usaha melindungi hak anak. Penelitian ini tergolong penelitian kepustakaan yang menggunakan pendekatan analisa bahan hukum. Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa kedudukan hukuman kebiri kimia yang dijadikan pidana tambahan adalah kurang tepat karena efektivitas penerapan pidana atau sanksi tersebut hanya dapat dilihat setelah pelaku menyelesaikan pidana pokoknya yang minimal selama 5 sampai 20 tahun penjara. Selain itu, tindakan sanksi kebiri kimia ini sudah bersifat memberikan nestapa atau penderitaan bagi pelaku, maka sanksi ini dikategorikan sebagai pidana tambahan tidak tepat dan tidak dapat member pengaruh dalam jangka dekat terhadap perlindungan anak.²⁵

Adapun yang membedakan penelitian penulis dengan penelitian yang lainnya, diantaranya ialah :

1. Ketiga penelitian tersebut tidak ada yang membahas mengenai sudut pandang (perspektif) *Fiqh Siyasah* dalam menganalisis hukuman kebiri kimia.
2. Ketiga Penelitian tersebut menggunakan metode *comparative content analisis* yang membandingkan atas hukum islam dan hukum positif sebagai sudut pandang dalam menganalisis permasalahan Kebiri Kimia yang ditelitinya, sedangkan dalam penelitian yang dilakukan penulis menggunakan metode *content analisis* saja dengan cara berpikir

²⁵ Rurialwan Pawana, "Analisis Sanksi Kebiri Kimia Dalam Perspektif Perlindungan Anak", (Skripsi : Universitas Jember, 2020)

induktif dengan pendekatan konseptual dan bukan hanya pendekatan perundang-undangan saja seperti kedua penelitian diatas.

3. Ketiga Penelitian tersebut menekankan kepada Peraturannya serta implementasi sanksi kebiri kimia yang akan mengimplikasi terhadap upaya perlindungan anak, sedangkan penelitian saya memfokuskan terhadap regulasi hukuman kebiri kimia.

H. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah tata cara bagaimana suatu penelitian itu dilaksanakan. Metode penelitian juga membicarakan mengenai bagaimana cara melaksanakan penelitian.²⁶

Berdasarkan penjelasan diatas, maka penulis perlu menentukan cara atau metode yang dianggap penulis paling sesuai untuk digunakan dalam penelitian ini.

1. Jenis dan Sifat Penelitian

a. Jenis Penelitian

Sesuai dengan permasalahan yang penulis teliti, maka jenis penelitian ini dikategorikan sebagai jenis penelitian kepustakaan (*Library research*), yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data-data dan informasi dengan bantuan berbagai

²⁶ Susiadi AS, *Metode Penelitian*, (BandarLampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M IAIN Raden Intan Lampung, 2015), 19.

buku yang berkaitan dengan masalah yang penulis teliti yang akan dibahas dalam penelitian ini.²⁷

b. Sifat Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan sifat penelitian *deskriptif analitis*, yaitu suatu metode yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberikan gambaran terhadap obyek yang diteliti melalui data yang telah terkumpul dan melakukan analisis serta memberikan kesimpulan untuk umum.

Penelitian ini menggunakan 2 jenis pendekatan untuk mendapatkan hasil valid yaitu diantaranya pendekatan konseptual (*conseptual approach*) dan pendekatan perundang-undangan (*statue approach*). Pendekatan konseptual (*conseptual approach*) adalah pendekatan yang beranjak dari pandangan-pandangan atau doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum atau bidangnya yang kemudian dapat dijadikan sebagai pijakan untuk membagi argumentasi hukum ketika menyelesaikan isu hukum yang dihadapi. Kemudian pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) adalah pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua Undang-Undang dan regulasi yang bersangkutan dengan isu hukum yang ditangani.²⁸

²⁷ Johny Ibrahim, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, (Malang: BanyumediaPublishing, 2006), 295.

²⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), 35.

2. Sumber Data

Penelitian pada umumnya dibedakan antara data yang diperoleh secara langsung dari masyarakat dan data yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka. Data yang diperoleh secara langsung dari masyarakat atau sumber utamanya dinamakan data primer (data dasar), sedangkan data yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka lazimnya dinamakan data sekunder. Sumber data utama yang digunakan dalam proposal skripsi ini ialah data sekunder yaitu bahan-bahan pustaka yang mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, perpustakaan, peraturan perundang-undangan, karya ilmiah, artikel-artikel serta dokumen yang berkaitan dengan materi penelitian. Dari data hukum sekunder ini mencakup 3 bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini, diantaranya :

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu bahan pokok yang digunakan dalam proses penelitian. Dimana bahan hukum ini bersifat *otoritatif* artinya memiliki otoritas. Diantaranya adalah Al-Qur'an, Hadist Bukhari dan Muslim, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 jo. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, Perppu Nomor 1 Tahun 2016, Perppu Nomor 70 Tahun 2020 dan Peraturan-peraturan Hukum lainnya.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder, yaitu bahan pendukung atau bahan yang mengiringi, menjelaskan bahan hukum primer. Seperti buku-buku hukum, skripsi, tesis, disertasi hukum serta jurnal-jurnal hukum termasuk juga bahan sumber dari berita atau artikel online.²⁹

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberi penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus, ensiklopedia dan lain sebagainya.

3. Metode Pengumpulan Data

Metode dalam pengumpulan data pada penelitian ini ialah dengan melakukan penentuan bahan hukum, inventarisasi (dokumen) bahan hukum yang relevan dan sesuai dengan isu hukum dan pengkajian dari berbagai bahan hukum.

Metode yang dilakukan penulis untuk melakukan penelitian pustaka ini dengan cara membaca terlebih dahulu buku-buku terkait penelitian, kemudian setelah dibaca penulis melakukan telaah terhadap bahan bacaan tadi dan menganalisis serta langsung mengutip beberapa kalimat yang berkaitan dengan kajian yang penulis teliti.³⁰

²⁹ *Ibid.*, 141

³⁰ Johny Ibrahim, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, ..., 312.

4. Metode Pengolahan Data

Adapun metode pengolahan data yang digunakan dalam proposal skripsi ini ialah :

- a. Pemeriksaan Data (*Editing*), yaitu mengoreksi apakah data yang terkumpul sudah lengkap, sudah benar dan sudah sesuai dengan masalah.
- b. Verifikasi Data (*Verification*), yaitu mengelompokkan data dan memahami makna dari data tersebut.
- c. Klasifikasi Data (*Classification*), yaitu pengelompokkan data menjadi bahan pokok bahasan sehingga sesuai dengan tujuan agar mudah menganalisis data yang akan ditentukan.
- d. Sistemisasi Data (*Systemizing*), yaitu menempatkan data menurut kerangka sistematika bahasan berdasarkan urutan masalah/variabel penelitian.³¹

5. Analisa Data

Setelah data diperoleh dan terkumpul, selanjutnya diolah sesuai dengan sistematikanya dan kemudian dianalisa, dalam penelitian ini penulis menganalisis data yang ada dengan menggunakan metode *Content Analysis*, yaitu metode apapun yang digunakan untuk menarik kesimpulan melalui usaha menemukan karakteristik pesan dan dilakukan secara objektif serta sistematis, sehingga diperoleh suatu

³¹ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bhakti, 2004), 126.

kesimpulan dalam penelitian. Dalam menganalisis data dan menarik kesimpulan, penulis menggunakan cara berpikir *induktif*, yaitu penarikan kesimpulan atau fakta-fakta yang khusus, peristiwa-peristiwa yang konkret kemudian dari fakta-fakta dan peristiwa khusus tersebut ditarik generalisasi yang umum.

Selanjutnya, dalam menganalisis data, penulis juga menggunakan metode *kualitatif*, yaitu suatu metode analisis data yang terkumpul untuk kemudian digambarkan dengan kata-kata atau kalimat, dipisah-pisah menurut kategori sehingga diperoleh kesimpulan akhir.³²



³²Soejono Abdurrahman, *Metode Penelitian*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2005), 13.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Fiqh Siyasah

1. Pengertian Fiqh Siyasah

Istilah Fiqh Siyasah merupakan sebuah kalimat majemuk atau *tarkib idhafi* yang terdiri dari dua kata, yaitu *Fiqh* dan *Siyasah*. Secara etimologis, *fiqh* merupakan kata yang berbentuk *mashdar* dari sebuah *tashrifan* kata *faqih*-*yafqahu*-*fiqhan* yang berarti pemahaman mendalam serta akurat sehingga dapat memahami tujuan ucapan dan atau tindakan tertentu. Secara terminologis, *fiqh* juga cenderung didefinisikan sebagai ilmu tentang hukum-hukum *syara'* yang bersifat perbuatan yang mudah dipahami dari dalil-dalil yang terperinci.³³

Maksud dari dalil-dalil yang rinci diatas, setiap hukum perbuatan mukallaf yang dibahas dalam ilmu fiqh itu masing-masing ada dalilnya, sekalipun dalil tersebut tidak bersifat rinci, atau bahkan malah bersifat umum yang masih memerlukan penjelasan lebih lanjut.

Sementara dari kajian *ushul fiqh*, *fiqh* memiliki arti pengetahuan tentang hukum-hukum *syara'* yang memiliki sifat *amaliyah* yang digali dari dalil-dalil yang lebih terperinci. Pengertian ini menunjukkan bahwa *fiqh* adalah hasil *ijtihad* yang telah dilakukan oleh para ulama (*ulil amri*) melalui kajian-kajian dalil tentang berbagai macam

³³ Muzar ibnu syarif, Khammi Zada, "*Fiqh Siyasah*", ..., 2

persoalan hukum, baik yang disebutkan secara langsung maupun tidak langsung didalam *Al-Qur'an* dan *As-Sunnah*.³⁴

Al-Amidi mendefinisikan *fiqh* sebagai suatu ilmu tentang seperangkat hukum-hukum *syara'* yang bersifat *furu'iyah* yang berhasil didapatkan melalui penalaran atau *istidlal*.³⁵

Siyasah atau *As siyasah* berasal dari kata *sasa-yasusu-siyasah* yang berarti “Mengatur, mengendalikan, mengurus, atau membuat keputusan”. Secara harfiah *siyasah* memiliki arti pemerintahan, pengambilan keputusan, pembuat kebijakan, pengurusan, pengawasan, perekayasaan, dan arti-arti lainnya.³⁶ *Siyasah* juga sering dimaknai sebagai “Memerintah, pemerintah, politik dan pembuatan kebijakan”. Pengertian kebahasaan ini mengisyaratkan bahwasanya tujuan *siyasah* adalah mengatur, mengurus, dan membuat kebijaksanaan atas sesuatu yang bersifat politis untuk mencakup sesuatu.³⁷

Abdul Wahab Al- Khalaf mendefinisikan *fiqh siyasah* sebagai ilmu yang membahas tentang cara pengaturan masalah ketatanegaraan seperti (bagaimana mengadakan) perundang-undangan dan berbagai peraturan lainnya yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam, meskipun

³⁴ Toha Andiko, “Pemberdayaan Qawa'id Fiqqiyah Dalam Penyelesaian Masalah-Masalah Fiqh Siyasah Modern”, *Jurnal Al-'adalah*, Vol.12, No.1, (2014) : h.106, <https://scholar.google.com/> diunduh pada tanggal 2 Mei 2020

³⁵ Amir Syarifuddin, “*Ushul Fiqh*”, ...,4.

³⁶ H. Dzajuli, “*Fiqh Siyasah*”, ..., 26.

³⁷ Muhammad Iqbal, “*Fiqh Siyasah*”, ..., 3.

mengenai pengaturan persoalan tersebut tidak ada dalil khusus yang mengaturnya.³⁸

Kemudian Ahmad Fathi Bahansi mendefinisikan *fiqh siyasah* sebagai تدير مصالح العباد على وفق الشرع. (pengaturan kemaslahatan manusia berdasarkan Syara).³⁹

Ibn Aqil juga menafsirkan *fiqh siyasah* sebagai :

”siyasah adalah segala perbuatan yang membawa manusia lebih dekat kepada kemaslahatan dan jauh dari kemafsadatan, sekalipun Rasulullah tidak menetapkan dan (bahkan) Allah swt tidak menentukannya”⁴⁰

Berdasarkan pengertian diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa *fiqh siyasah* adalah ilmu tata negara islam yang secara spesifik membahas tentang seluk-beluk pengaturan kepentingan umat manusia pada umumnya dan negara pada khususnya, berupa penetapan hukum, peraturan, dan kebijakan oleh pemegang kekuasaan yang bernafaskan atau sejalan dengan ajaran Islam, guna mewujudkan kemaslahatan bagi manusia dan menghindarkannya dari berbagai kemudharatan yang mungkin timbul dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang dijalaninya.

³⁸ Mular Ibnu Syarif, Khammi Zada, “*Fiqh Siyasah*”, ..., 10.

³⁹ *Ibid.*

⁴⁰ A. Dzajuli, “*Fiqh Siyasah*”, ..., 27.

2. Batasan dan Fungsi Fiqh Siyasah

Proses yang ada pada Fiqh siyasah sebenarnya apabila diperhatikan dapat disamakan juga dengan ilmu politik yang mana memiliki 2 unsur dalam prosesnya yaitu negara yang pemerintahnya bersifat eksklusif dan unsur masyarakat.⁴¹ Sedangkan dalam fiqh siyasah juga memiliki dua unsur yang berhubungan dengan timbal balik yaitu pihak yang mengatur (pemerintah) dan pihak yang diatur (masyarakat).

Ibn ‘Abid al-Diin mengungkapkan batasan pada siyasah ialah :

“Siyasah adalah kemaslahatan untuk manusia dengan menunjukkannya kepada jalan yang menyelamatkan, baik didunia maupun di akhirat. Siyasah berasal daripada nabi, baik secara khusus maupun secara umum, baik secara lahir maupun secara batin. Segi lahir siyasah berasal dari para pemegang kekuasaan (para Sulthan dan Araja) bukan dari ulama, sedangkan secara batin siyasah berasal dari ulama pewaris Nabi bukan dari pemegang kekuasaan.”⁴²

Abdul Wahab Al-Khalaf mengemukakan batasan siyasah seperti :

“Siyasah syar’iyyah ialah pengurusan hal-hal yang bersifat umum bagi negara Islam dengan cara yang menjamin perwujudan kemaslahatan dan penolakan kemudaratatan dengan tidak melampaui batas-batas syariah dan pokok-pokok syariah dan kulli’, meskipun tidak sesuai dengan pendapat ulama-ulama mujtahid.”⁴³

⁴¹ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Ilmu Negara dan Politik*, (Bandung: PT. Eresco, 2008), 6.

⁴² A. Dzajuli, “*Fiqh Siyasah*”, ..., 27.

⁴³ *Ibid.*, 28.

Kemudian fiqh siyasah juga memiliki fungsi yang sedikit berbeda dari pendefinisian fungsi kenegaraan dalam ilmu politik kontemporer, sebagaimana yang dikutip Ali Syariati bahwa siyasah sendiri memiliki fungsi pelayanan (*khidmah*), dan fungsi pengarahan (*ishlah*).⁴⁴

3. Objek Fiqh Siyasah

Dari batasan-batasan dalam fiqh siyasah dapat kita ketahui bahwa objek fiqh siyasah secara eksplisit meliputi aspek pengaturan hubungan antara warga negara dengan warga negara, hubungan antara warga negara dengan lembaga negara, hubungan antara lembaga negara dengan lembaga negara, baik hubungan itu bersifat internal suatu negara maupun bersifat eksternal antar negara.

Sebagaimana penjelasan yang dikatakan oleh T.M. Hasbi Ash Shiddieqy bahwa objek kajian siyasah adalah pekerjaan-pekerjaan mukallaf dan urusan-urusan mereka dari jurusan penafsirannya, mengingat persesuaian penadbiran itu dengan jiwa syariah, yang kita tidak peroleh dalinya yang khusus dan tidak berlawanan dengan suatu nash dari nash-nash yang merupakan syariah 'amah yang tetap.⁴⁵

Abdul Wahab Khallaf menjabarkan bahwa objek pembahasan ilmu siyasah adalah pengaturan dan perundang-undangan yang dituntut oleh hal ihwal kenegaraan dari segi persesuaiannya dengan pokok-

⁴⁴ *Ibid.*

⁴⁵ Hasbi Ash Shiddieqy, *Asas-Asas Hukum Tata Negara Menurut Syariah*, (Jakarta: Matahari Masa, 2009), 28.

pokok agama dan merupakan realisasi kemaslahatan manusia serta memenuhi kebutuhannya.⁴⁶

4. Ruang Lingkup Fiqh Siyasah

Fiqh Siyasah sendiri memiliki ruang lingkup tersendiri dalam hal kajiannya. Adapun ruang lingkup *fiqh siyasah* dikalangan para ahli *fuqaha* terjadi perdebatan.

Hasbi Ash Shiddieqy membagi ruang lingkup *fiqh siyasah* menjadi delapan bidang, yaitu:⁴⁷

- a. *Siyasah Dusturiyah Syar'iyah*
- b. *Siyasah Tasyri'iyah Syar'iyah*
- c. *Siyasah Qadha'iyah Syar'iyah*
- d. *Siyasah Maliyah Syar'iyah*
- e. *Siyasah Idariyah Syar'iyah*
- f. *Siyasah Kharijiyah Syar'iyah/ Siyasah Dawliyah*
- g. *Siyasah Tanfiziyyah Syar'iyah*
- h. *Siyasah Harbiyyah Syar'iyah*

Menurut Abdul Wahab Khallaf, secara umum ada tiga ruang lingkup *fiqh siyasah* yaitu :⁴⁸

- a. *Siyasah Dusturiyah*

Yaitu membahas tentang hubungan antara pemimpin/imam dengan rakyat/umat serta kelembagaan-kelembagaan yang ada didalam masyarakat, seperti membahas pengaturan dan perundang-undangan yang dituntut oleh hal ihwal kenegaraan dari segi

⁴⁶ Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2012), 15.

⁴⁷ Hasbi Ash Shiddieqy, *Asas-Asas Hukum Tata Negara*, ..., 8.

⁴⁸ Muzar Ibnu Syarif, Khammar Zada, "*Fiqh Siyasah*", ..., 16.

persesuaian dengan prinsip-prinsip agama dan merupakan realisasi kemaslahatan manusia serta memenuhi kebutuhannya.

b. *Siyasah Kharijiyah*

Yaitu membahas tentang hubungan internasional atau politik luar negeri dalam sebuah kenegaraan.

c. *Siyasah Maliyah*

Yaitu membahas tentang sumber keuangan negara dan tata cara pengelolaan serta pendistribusian harta kekayaan negara.

Melihat dari pengertian *fiqh siyasah* sendiri, sudah jelas dapat diketahui bahwa dasar hukum yang digunakan dalam *Fiqh Siyasah* ialah merujuk kepada nash, yaitu Al-Qur'an dan Hadis yang merupakan acuan dari segala sumber hukum dalam ajaran Islam. Dalam kajian *Fiqh Siyasah* juga menggunakan *Ijtihad* sebagai dasar hukum penunjang bagi dasar hukum utamanya yaitu Al-Qur'an dan Hadis tadi. *Ijtihad* sendiri secara sederhana dimaknai sebagai kesepakatan para *Mujtahid* pada suatu zaman untuk memutuskan suatu perkara hukum yang tidak diatur secara eksplisit dalam Al-Qur'an dan Hadis pada masa itu.⁴⁹

⁴⁹Abdul Hayy Abdul 'Al, *Pengantar Ushul Fiqh*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2014), 337.

B. Pedofil (Pedofilia)

Istilah Pedofil atau Pedofilis merupakan suatu ungkapan atau julukan bagi seseorang yang mengidap suatu kelainan seksual yang digolongkan sebagai famili dari *Parafilia* yaitu Pedofilia. Secara harfiah, awalnya istilah Pedofilia diartikan sebagai rasa kasih orang dewasa yang mencintai anak-anak. Karena melihat dari pengertian secara etimologi, Pedofilia berasal dari bahasa Yunani yaitu *paedo* (anak-anak), dan *philia* (cinta).⁵⁰ Akan tetapi, terjadi perkembangan kemudian sehingga istilah Pedofilia digunakan sebagai istilah untuk menerangkan salah satu kelainan perkembangan psikoseksual dimana individu tersebut memiliki hasrat erotis yang abnormal terhadap anak-anak.⁵¹ Dalam *The American Heritage Setedmen's Medical Dictionary* mengartikan Pedofilia sebagai tindakan atau fantasi pada orang dewasa yang terlibat dalam aktivitas seksual dengan anak-anak.⁵² Sedangkan World Health Organization (WHO) mendefinisikan Pedofilia sebagai gangguan mental dan perilaku, gangguan pilihan ketertarikan seksual yang mengindikasikan ketertarikan seksual

⁵⁰ Evy Rachmawati, "Sisi Kelam Pariwisata Di Pulau Dewata", dalam *Kompas.com*, Mei 9, 2018, <https://www.kompas.com/kompascetak/0509/28/humaniora/2083218.htm> diunduh pada tanggal 9 Juni 2020

⁵¹ Junita B. Mokale, "Pedofilia Sebagai Salah Satu Bentuk Kejahatan Kekerasan Seksual Terhadap Anak", *Lex Crimen*, Volume II, No. 5, (2013): 102, <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexcrimen/article/view/3122> diunduh pada tanggal 9 Juni 2020

⁵² Santhos Wachjoe, *Hukuman Kebiri Bagi Pelaku Pedofilia, Suatu Tinjauan Yuridis Sosiologis*, (Jakarta: IKAHI, 2015), h. 45-46 pratinjau melalui e-gogglebook.id pada tanggal 10 Juni 2020

kepada anak-anak laki-laki, perempuan maupun keduanya, umumnya usia pra-pubertas maupun pubertas awal.⁵³

Secara terminologi, Pedofilia diartikan sebagai suatu kelainan seksual berupa hasrat maupun fantasi impuls seksual yang melibatkan anak dibawah umur baik dengan cara memaksa, mengancam ataupun bujukan halus (manipulasi) dengan cara melakukan penetrasi penis sebagian atau keseluruhan terhadap alat genital anak.⁵⁴

Pedofilia dalam Islam dikategorikan sebagai perbuatan melanggar hukum atau jarimah dan hukuman atau sanksi berupa hukuman had atau ta'zir bagi orang yang melakukannya. Tidak ada penyebutan secara implikatif mengenai Pedofilia dalam hukum islam, akan tetapi perbuatan Pedofilia dapat dikategorikan sebagai kejahatan kesucilaan yang biasa disandingkan dengan zina dan pemerkosaan dalam islam.⁵⁵

Adapun kriteria seseorang mengidap Pedofilia yang kemudian akan menjadi bakal calon Pedofil atau Pedofilis berdasarkan DSM-IV ialah :⁵⁶

1. Selama waktu kurang lebih 6 bulan, terdapat khayalan yang merangsang secara seksual, dorongan seksual, atau perilaku yang berulang dan kuat berupa aktivitas seksual terhadap anak pre-pubertas atau dibawah umur (sekitar umur 13 tahun kebawah).

⁵³ Regia Vandra, "Pemaknaan Kaum Ibu Terhadap Kasus Pedofilia", (Tesis, Jakarta : Universitas Indonesia, 2015), 33.

⁵⁴ Thamiep, "Definisi Pedofilia", dalam *Id. Scribd*, Juli 10, 2015, <https://id.scribd.com/doc/94107015/Definisi-pedofilia-pedofil>, diunduh pada tanggal 10 Juni 2020

⁵⁵ Fuadi, M. Anwar, "Dinamika Psikologis Kekerasan Seksual : Sebuah Studi Fenomenologi", *Jurnal Psikologi Islam-Psikoislamika*, Vol. 8, No.2, (2011) : 191, <http://ejournal.uin-malang.ac.id/index.php/psiko/article/view> diunduh pada tanggal 12 Juni 2020

⁵⁶ *Ibid.*

2. Khayalan, dorongan seksual atau perilaku menyebabkan penderitaan yang bermakna secara klinis atau gangguan dalam fungsi sosial, pekerjaan, atau fungsi penting lainnya.
3. Orang sekurang-kurangnya berusia 16 tahun dan/atau berusia 5 tahun lebih tua daripada anak-anak yang menjadi korban.

Pada umumnya, seorang Pedofil atau Pedofilis merupakan seseorang yang sudah dewasa dan biasanya memiliki riwayat buruk mengenai perlakuan seksual (dalam hal ini bisa jadi pernah menjadi korban kasus serupa). Akan tetapi, untuk mengetahui secara pasti seorang individu dapat dinyatakan seorang Pedofil atau tidak, perlu dilakukan pemeriksaan Psikologis lebih lanjut. Beberapa Pedofil atau Pedofilis terlihat normal seperti individu lainnya dan tidak menunjukkan indikasi mencolok bahwa mereka mengidap penyakit Pedofilia.

Berdasarkan keterangan dari Ikatan Psikologi Indonesia, bahwa umumnya seorang Pedofil baru bisa terdeteksi apabila ia telah menjalankan minimal satu kali aksinya dalam hal memuaskan hasrat erotisnya terhadap anak dibawah umur. Tidak semua anak awalnya dapat dideteksi mengidap penyakit Pedofilia hanya berdasarkan kriteria semata.⁵⁷ Selain itu, Pedofilia secara teori pada dasarnya tidak dapat disamakan sepenuhnya dengan pengertian pelaku kekerasan seksual. Karena, Pedofilia merupakan salah satu penyakit yang ada dalam individu seseorang. Tidak semua Pedofilia

⁵⁷ Alit Kurniasari, Yurika Fauzia Wardhani, "Pedofilia Sebagai Ancaman Tersembunyi Bagi Anak", Volume 2, No3, (2016) : 316, <https://doi.org/10.33007/inf.v2i3.840> diunduh pada tanggal 14 Juni 2020

dapat menjadi pelaku kekerasan seksual, namun, berdasarkan *Diagnostic and Statistical Manual Of Mental Disorder* 95% pengidap Pedofilia akan cenderung menjadi seorang pelaku kekerasan seksual terhadap anak dibawah umur. Hal tersebut karena kurangnya rehabilitasi dini terhadap individu yang telah menunjukkan gejala Pedofilia sedari dini.⁵⁸

Pedofilia sendiri biasanya memang lebih cenderung diperuntukkan kepada kaum Pria, akan tetapi ada juga wanita yang berkemungkinan menunjukkan gejala Pedofilia. Sampai sekarang belum ada penelitian yang mengatakan bahwa Pedofilia dapat disembuhkan dengan obat, Pedofilia hanya bisa dikurangi dan diminimalisir secara perlahan dengan terapi tertentu, akan tetapi tentunya hal tersebut tidak bersifat permanen. Berdasarkan perilakunya, Pedofilia dapat dikategorikan ke dalam :⁵⁹

1. *Immature Pedophiles*

Pelaku cenderung melakukan pendekatan kepada targetnya yang masih anak-anak dibawah umur. Misalnya dengan cara mengiming-imingi korban dengan hal-hal menyenangkan.

2. *Regressed Pedophiles*

Pelaku umumnya memiliki istri yang dijadikan sebagai topeng penyimpangan orientasi hasrat seksualnya. Pelaku dalam aksinya memiliki tipe yang bersifat memaksa korbannya tanpa memerlukan mengiming-imingi terlebih dahulu.

⁵⁸ Florida State Law Review, *Chemical Castration Law: A Return to the Dark Ages*, Number 25, Florida's 1997 diunduh pada tanggal 16 Juni 2020

⁵⁹ *Ibid.*, 320.

3. *Aggressive Pedophiles*

Pelaku jenis ini lebih agresif dan perilaku antisocial dalam lingkungan kehidupannya. Tipe ini biasanya memiliki keinginan untuk menyerang korban bahkan tidak jarang ditemuka Pedofil tipe ini bisa berpotensi membunuh korbannya setelah mendapatkan tujuan seksualnya.

Menurut Ames dan Houston (1990) terdapat beberapa factor yang membuat seseorang memiliki gangguan Pedofilia yaitu :⁶⁰

1. Faktor Psikopatologi dan Kepribadian

Melihat bahwa para pedofil memiliki gangguan fungsi interpersonal seperti peningkatan model pasif agresif serta adanya gangguan konsep diri. Pernah melakukan pelanggaran seksual pada anak lain atau mengkonsumsi pornografi ketika usia anak-anak serta pengalaman seksual pada masa anak-anak yang akan memicu perasaan senang apabila dirasakan kembali pada saat menjadi dewasa.

2. Faktor Gangguan Genetis

Menurut Ames dan Houston, gangguan genetis yang dialami oleh kaum Pedofilia biasanya dikarenakan mengalami gangguan perkembangan saraf yang dikuatkan dengan cirri fisik seperti bertubuh pendek, tingkat kecerdasan rendah, tingkat androgen prenatal.

⁶⁰ American Phsychiatric Association, “*Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders*”, (Washington DC : American Psyciatric Publishing, 5th Edition, 2013), <https://doi.org/10.1176/appi.books.9780890425596> diunduh pada tanggal 16 Juni 2020

3. Faktor Biologis

Menganggap bahwa gangguan Pedofilia terjadi karena adanya kelainan pada hormone seksual pria atau serotonin kimia otak, namun hal ini belum terbukti sebagai factor dalam pengembangan gangguan Pedofilia. Dalam perspektif Biologis, yang terjadi pada masa pubertas dan pengaktifan hormonal dalam masa ini sangat rawan terjadinya penyimpangan seksual pada diri anak.

4. Pandangan Sosiokultural

Pandangan ini memandang bahwa penyebab Pedofilia itu kompleks dan bervariasi. Stereotip individu kaum Pedofilia sebagai yang lemah, pemalas, mempunyai hubungan social yang canggung, dan seorang penyendiri yang merasa terancam oleh hubungan dengan orang dewasa dan perasaan itu berbelok kepada anak-anak untuk mendapatkan kepuasan seksual karena anak-anak dianggap tidak banyak mengkritik dan menuntut.⁶¹

Factor sosiokultural ini juga dinilai berkaitan erat dengan nilai keharmonisan dan kehangatan yang didapat anak dalam keluarga dan lingkungannya. Anak yang berkembang pada kondisi emosi dengan rasa tidak aman dan nyaman dalam hubungan emosionalnya dengan orang tua sejak anak-anak berkemungkinan lebih besar akan tumbuh dengan berbagai permasalahan gangguan psikologis.

⁶¹ *Ibid.*

Sedangkan dalam konteks *fiqh siyasah* dan hukum islam tidak mengenal istilah Pedofilia. Namun, Beberapa ulama fiqh memang meng-*qiyas* kan antara perbuatan Pedofilia dengan perbuatan zina, mereka juga menganggap bahwa hukuman untuk pelaku Pedofilia harus disamakan dengan hukuman bagi pezina. Perzinaan dalam islam dibedakan menjadi 3 yaitu *Mushan* (yang sudah menikah), *Ghair muhsan* (yang belum menikah) dan *Liwath* atau sodomi. Perzinaan secara sederhana diartikan oleh *Abdul Qader 'Oudah* sebagai hubungan seksual yang diharamkan yang memasukkan penis laki-laki ke vagina perempuan baik seluruhnya atau sebagian (*iltiqaa' khitaanain*).⁶² Begitupun dengan *liwath* (Homoseksual atau Sodomi) dalam islam diartikan sebagai hubungan seksual atau kelamin sesama jenis baik sesama laki-laki maupun sesama perempuan dengan cara memasukkan alat kelamin ke anus pasangannya.⁶³ Larangan itu sudah jelas diatur dalam *nash*, sebagaimana dalam firman Allah swt dalam Q.S. Al-Araf ayat 80-84:

وَلَوْطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعَالَمِينَ (٨٠)
 إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِنْ دُونِ النِّسَاءِ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ مُّسْرِفُونَ (٨١) وَمَا كَانَ
 جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَنْ قَالُوا أَخْرِجُوهُمْ مِنْ قَرْيَتِكُمْ إِنَّهُمْ أَنْفُسٌ يَتَطَهَّرُونَ (٨٢) فَأَنْجَيْنَاهُ
 وَأَهْلَهُ إِلَّا امْرَأَتَهُ كَانَتْ مِنَ الْغَابِرِينَ (٨٣) وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا فَأَنْظَرُوا كَيْفَ كَانَ
 عَاقِبَةُ الْمُجْرِمِينَ (٨٤)

⁶² Neng Djubaedah, *Perzinaan Dalam Peraturan Perundang-Undangan Diindonesia Ditinjau Dari Hukum Islam*, (Jakarta: Prenadia Media Group, 2010), 119.

⁶³ *Ibid.*, 263.

“(80). Dan (kami juga telah mengutus) Luth (kepada kaumnya). (ingatlah) tatkala Dia berkata kepada mereka: "Mengapa kamu mengerjakan perbuatan faahisyah itu, yang belum pernah dikerjakan oleh seorangpun (di dunia ini) sebelummu?" (81). Sesungguhnya kamu mendatangi lelaki untuk melepaskan nafsumu (kepada mereka), bukan kepada wanita, malah kamu ini adalah kaum yang melampaui batas. (82). Jawab kaumnya tidak lain hanya mengatakan: "Usirlah mereka (Luth dan pengikut-pengikutnya) dari kotamu ini; Sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang berpura-pura mensucikan diri." (83). Kemudian Kami selamatkan Dia dan pengikut-pengikutnya kecuali isterinya; Dia Termasuk orang-orang yang tertinggal (dibinasakan). (84). Dan Kami turunkan kepada mereka hujan (batu); Maka perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang berdosa itu.” (Q.S. Al-Araf ayat 80-84)

Dalam ayat ini menerangkan larangan tentang perbuatan *liwath* atau paederastia yaitu hubungan seksual antara lelaki dengan lelaki (homoseksual), dan juga antara wanita dengan wanita (lesbian).⁶⁴

C. Kebiri Dalam Islam

Dalam *Fiqh siyasah* yang mengambil segala sesuatu dari rujukan Hukum Islam (Syari'ah) yaitu Al-Qur'an dan Al-Hadist, Kebiri sendiri secara etimologi dalam bahasa Arab disebut “اخصي”. Sedangkan secara terminologi, pengebirian dalam Islam juga diartikan sebagai pemotongan buah dzakar yang dapat dibarengi dengan pemotongan testis.⁶⁵

Al-ikhso (اخصي) jelas telah dilarang oleh Rasulullah saw, sebagaimana beberapa hadist yang diriwayatkan berikut ini :

⁶⁴ Ahsin W. Alhafidz, *Fikih Kesehatan*, (Jakarta : AMAZAH, 2010), 239-240.

⁶⁵ Ibrahim Musthafa Ahmad, “*Mu'zamal Washit*”, (Darun Nasyr: Daud Da'wah), h.239, pratinjau melalui e-googlebook.id pada tanggal 16 Juni 2020

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ الْهَمْدَانِيُّ: حَدَّثَنَا أَبِي وَوَكَيْعٌ وَابْنُ بَشِيرٍ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ قَيْسٍ قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ يَقُولُ: كُنَّا نَعُزُّو مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ لَيْسَ لَنَا نِسَاءٌ. فَقُلْنَا: أَلَا نَسْتَحْصِي؟ فَنَهَانَا عَنْ ذَلِكَ،⁶⁶

“Muhammad bin ‘Abdullah bin Numair Al-Hamadani telah menceritakan kepada kami: Ayahku, Waki’, dan Ibnu Bisyr menceritakan kepada kami, dari Isma’il, dari Qais, beliau mengatakan: Aku mendengar ‘Abdullah mengatakan: Kami pernah pergi berperang bersama Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam dan kami tidak membawa serta para istri. Kami bertanya: Bolehkah kami mengebiri diri kami? Namun beliau melarang kami dari hal itu,...” (HR. Muslim nomor 1404)

Larangan tentang tindakan kebiri untuk menghilangkan hawa nafsu (syahwat) juga diriwayatkan dalam Musnad Ahmad no 14506 :

حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ يَغْنِي ابْنُ خَالِدٍ حَدَّثَنَا رَبَاحٌ عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ قَالَ ; حَدَّثَنِي رَجُلٌ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ جَاءَ شَابٌّ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ أَتَأْذُنِي فِي الْخِصَاءِ فَقَالَ صُمْ وَسَلِّ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ⁶⁷

Telah bercerita kepada kami [Ibrahim] yaitu Ibnu Khalid, telah bercerita kepada kami [Robah] dari [Ma'mar] dari [Yahya bin Abu Katsir] berkata; telah bercerita kepadaku [seorang laki-laki] dari [Jabir bin Abdullah] berkata; telah datang seorang pemuda kepada Rasulullah Shallallahu'alaihiwasallam dan berkata; “Apakah anda mengijinkanku untuk berkebiri? (Rasulullah Shallallahu'alaihiwasallam) bersabda: "Berpuasalah dan mohonlah kepada Allah dari kurnia-Nya.”

Telah diriwayatkan juga dalam hadist shahih Bukhari bahwa Rasulullah melarang perbuatan kebiri ;

⁶⁶ Imam Muslim, *Kitab Shahih Muslim*, (Makassar: Maktabah Fayyadh), hadist nomor 1404, pratinjau melalui egoogole.book.id pada tanggal 30 April 2020

⁶⁷ *Ibid.*

حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَوْنٍ حَدَّثَنَا خَالِدٌ عَنْ إِسْمَاعِيلَ عَنْ قَيْسٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ كُنَّا نَعُزُّو مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَيْسَ مَعَنَا نِسَاءٌ فَقُلْنَا أَلَا نَخْتَصِي ثُمَّ قَرَّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ فَتَنَاهَا عَنْ ذَلِكَ فَرَحَّصَ لَنَا بَعْدَ ذَلِكَ أَنْ نَتَزَوَّجَ الْمَرْأَةَ بِالثَّوْبِ آمَنُوا لَا تُحَرِّمُوا طَيِّبَاتٍ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ⁶⁸

Telah menceritakan kepada kami [Amru bin 'Aun] Telah menceritakan kepada kami [Khalid] dari [Isma'il] dari [Qais] dari [Abdullah radliallahu 'anhu] dia berkata; ” Kami pernah berperang bersama Nabi shallallaahu 'alaihi wasallam namun tidak mengikut sertakan istri-istri kami, lalu kami berkata: Wahai Rasulullah, tidakkah kami dikebiri? Namun Nabi shallallaahu 'alaihi wasallam melarang kami melakukannya. tapi setelah itu beliau memberikan keringanan kepada kami untuk menikahi wanita dalam waktu tertentu. lalu beliau membacakan ayat; Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu haramkan apa-apa yang baik yang telah Allah halalkan bagi kamu, dan janganlah kamu melampaui batas. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. (Al Maidah: 87).” (HR. Bukhari No 4249)

Selain itu, pengebirian dikenal dengan efek yang memberikan perubahan yang signifikan pada fisik individu seperti laki-laki yang akan menyerupai perempuan baik suaranya maupun fisiknya. Larangan tentang lelaki menyerupai wanita juga telah diatur dalam hadis berikut :

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: «لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُتَشَبِّهِينَ مِنَ الرِّجَالِ بِالنِّسَاءِ، وَالْمُتَشَبِّهَاتِ مِنَ النِّسَاءِ بِالرِّجَالِ

“Dari Ibnu Abbas Radhiyallahu anhuma, dia berkata: “Rasûlullâh Shallallahu ‘alaihi wa sallam melaknat laki-laki yang menyerupai wanita dan wanita yang menyerupai laki-laki” [HR. Al-Bukhâri, no. 5885; Abu Dawud, no. 4097; Tirmidzi, no. 2991]

⁶⁸ Muhammad Fu'ad Abdul Baqi, *Shahih Bukhari Muslim*, (Jakarta : PT Elex Media Komputindo, 2017), 1128.

Berdasarkan hadist yang diriwayatkan secara *mauquf* oleh Umar bin Khattab berikut ini juga mendukung pelarangan kebiri dalam islam,

69 قَلَّ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا كَنْيَسَةَ فِيهِ إِلَّا سَلَامٌ وَلَا خِصَاءَ

Umar berkata, Rasulullah saw bersabda : Tidak ada kerahiban dan pengebirian dalam Islam.” (HR. Ahmad)

Hadist-hadist tersebut telah menjelaskan secara detail alasan kebiri dilarang dan juga menerangkan secara jelas bahwa kebiri memang dilarang dalam islam. Akan tetapi pada hadist lain, Rasulullah memperbolehkan pengebirian berdasarkan riwayat hadis Sunan Nasa’i nomor 3163 berikut :

أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ مُوسَى قَالَ حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ عِيَاضٍ قَالَ حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي رَجُلٌ شَابْتُ قَدْ خَشِيتُ عَلَى نَفْسِي الْعَنَتَ وَلَا أَجِدُ طَوْلًا أَنْزَوِّجَ النِّسَاءَ أَفَأَخْتَصِي فَأَعْرِضَ عَنْهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى قَالَ ثَلَاثًا فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ جَفَّ الْقَلَمُ بِمَا أَنْتَ لَاقٍ فَاخْتَصِ عَلَى ذَلِكَ أَوْ دَعُ قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَوْزَاعِيُّ لَمْ يَسْمَعْ هَذَا الْحَدِيثَ مِنَ الزُّهْرِيِّ وَهَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ قَدْ رَوَاهُ يُونُسُ عَنْ الزُّهْرِيِّ

Telah mengkhabarkan kepada kami [Yahya bin Musa], ia berkata; telah menceritakan kepada kami [Anas bin 'Iyadh], ia berkata; telah menceritakan kepada kami [Al Auza'i] dari [Ibnu Syihab] dari [Abu Salamah] bahwa [Abu Hurairah] berkata; saya berkata; wahai Rasulullah sesungguhnya aku seorang pemuda yang takut dosa atas diriku, dan aku tidak mendapatkan kemampuan untuk menikahi wanita, bolehkah aku

⁶⁹ Muhammad Shiddiq Hasan Khan, “Ensiklopedia Hadist”, (Jakarta: Hikmah, 2009), 338.

⁷⁰ “Hadist Sunan An-Nasa’i Kitab Pernikahan”, dalam *Hadist.id*, <https://www.hadits.id/hadits/nasai/3163>, diunduh pada tanggal 28 Agustus 2020

mengebiri? Maka Nabi shallallahu 'alaihi wasallam berpaling darinya hingga ia mengatakan hal itu sebanyak tiga kali, lalu Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Wahai Abu Hurairah pena telah mengering dengan apa yang akan engkau temui, maka kebirilah karena itu atau tinggalkan, " Abu Abdurrahman berkata; Auza'i tidak mendengar hadis ini dari Az Zuhri, dan hadis ini adalah shohih dan telah diriwayatkan [Yunus] dari Zuhri.

Apabila melihat dari hadist ini, beberapa hadist lainnya dengan hadist ini terlihat kontradiktif karena di beberapa hadist Rasulullah melarang pengebirian sedangkan dalam satu kesempatan Rasulullah memperbolehkan kebiri, hal tersebut dapat dimaknai sederhana bahwa kemungkinan adanya ketentuan tertentu yang melatari perbolehan dan pelarangan tersebut.

Menurut Bahrudin Zamawi larangan pengebirian yang diriwayatkan Rasulullah memiliki setidaknya 3 alasan yaitu :⁷¹

1. Alasan kebiri yang dilakukan oleh para sahabat adalah untuk fokus dalam beribadah, tetapi perbuatan yang berlebihan (*mustyadid*) dalam ibadah sampai melakukan pengebirian dan meninggalkan kenikmatan dunia yang dihalalkan Allah Swt tidaklah dibenarkan dalam islam.
2. Kebiri dilakukan agar lebih fokus beribadah dan dilakukan dengan tujuan agar tidak terjerumus dalam perbuatan zina, namun kebiri bukanlah satu-satunya jalan untuk meninggalkan hal tersebut karena banyak alternatif lain untuk menekan hasrat seksual yaitu bisa dengan solat dan puasa.

⁷¹ Bahrudin Zamawi, "Aplikasi Teori Fungsi Interpretasi Jorge J.E Gracia Hadith Kebiri", *Maraji Jurnal Ilmu Keislaman*, Vol. 2, No. 2, (2016) : 425, <https://doi.org/10.36835/maraji.v2i2.54>, diunduh pada tanggal 30 Agustus 2020

3. Solusi pengganti kebiri dengan puasa dan solat guna menekan syahwat tersebut sepertinya tidak berlaku bagi orang yang terbiasa berpuasa seperti Abu Hurairah atau orang yang tidak bisa berpuasa atau dalam artian disini puasa tidak mampu lagi menekan rasa nafsunya. Maka, dalam hal ini kebiri diperbolehkan dalam hal darurat (*al-daruriyat*), tetapi orang tersebut akan mendapatkan peringatan (*al-tahdid*) karena melakukan kebiri menimbulkan dampak yang buruk bagi pelakunya.

D. Opini Terhadap Hukuman Kebiri Kimia

Penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2016 sebagai perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 yang mengatur tentang adanya hukuman kebiri bagi pelaku kejahatan seksual anak (pedofil) menjadi perbincangan dan perdebatan dikalangan masyarakat dan organisasi-organisasi kenegaraan. Pro dan kontra yang terjadi sejak rencana penerbitan Perppu Nomor 1 Tahun 2016 terus berlangsung bahkan hingga Perppu Nomor 1 Tahun 2016 telah ditandatangani Presiden pada Mei 2016.

Pengaturan hukuman kebiri kimia yang dijadikan pidana tambahan pada Perppu Nomor 1 Tahun 2016 berawal dari usulan yang diajukan oleh Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) justru berujung penolakan dari berbagai pihak terutama organisasi yang bergerak dalam bidang Hak Asasi Manusia. Beberapa organisasi Hak Asasi Manusia menyatakan penolakannya terhadap adanya hukuman kebiri kimia yang dijadikan sebagai pidana tambahan dalam upaya memperberat hukuman pidana

pelaku Pedofilia, menurut mereka hukuman kebiri kimia yang dijadikan alat untuk memperberat hukuman pidana pelaku Pedofilia tidak perlu dilakukan karena adanya perubahan Undang-Undang No 2 Tahun 2002 menjadi Undang-Undang No 35 Tahun 2014 yang telah mengatur untuk pemberatan hukuman bagi pelaku Pedofilia. Menurut beberapa organisasi Hak Asasi Manusia tersebut juga seharusnya penanganan korban kejahatan seksual memerlukan penanganan multi dimensi dan tidak bisa hanya bergantung pada penanganan melalui penegakan hukum saja.

Penolakan yang dinyatakan oleh organisasi-organisasi HAM tersebut memiliki dasar alasan sebagai berikut :⁷²

- a. Hukuman Kebiri tidak dibenarkan dalam system hukum pidana nasional atau tujuan hukum pemidanaan yang dianut oleh system hukum Indonesia.
- b. Hukuman kebiri melanggar Hak Asasi Manusia sebagaimana tertuang di berbagai konvensi internasional yang telah diratifikasi dalam hukum nasional diantaranya Konvenan Hak Sipil dan Politik (Konvenan Hak Sipil/ICCPR), Konvensi Anti Penyiksaan (CAT), dan juga Konvensi Hak Anak (CRC0, penghukuman badan dalam bentuk apapun harus dimaknai sebagai bentuk penyiksaan dan perbuatan merendahkan martabat manusia, terlebih apabila ditujukan untuk pembalasan dengan alasan utama efek jera yang diragukan secara ilmiah.

⁷² Supriyadi Widodo, dkk, “ *Menguji Euforia Kebiri*”, ..., 6.

- c. Segala bentuk kekerasan pada anak termasuk kekerasan seksual, pada dasarnya merupakan manifestasi atau operasionalisasi hasrat menguasai, mengontrol, dan mendominasi terhadap anak, dengan demikian hukum kebiri tidak menysasar akar permasalahan kekerasan dan kejahatan seksual pada anak.

Kritik atau argument selanjutnya juga datang dari Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (KOMNAS HAM) yang menolak mentah-mentah pengaturan hukuman kebiri kimia yang dimasukkan kedalam pasal 81 dalam Perppu Nomor 1 Tahun 2016. Menurut Komnas HAM, pengaturan hukuman kebiri jelas menentang hak asasi manusia yang telah diatur dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada pasal 28G ayat 2 yang berbunyi *“setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan yang merendahkan derajat martabat manusia dan berhak memperoleh suaka politik dari Negara lain”*, dan Pasal 31 ayat Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia yang menyatakan *“setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan, penghukuman, atau perlakuan yang kejam, tidak manusiawi, merendahkan derajat dan martabat kemanusiannya.”*

Hukuman kebiri kimia juga dianggap sebagai wujud penyiksaan yang mana penyiksaan merupakan tindakan dilarang berdasarkan Konvensi yang menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Hukuman Lain yang kejam, Tidak Manusiawi atau Merendahkan Martabat Manusia sebagaimana telah diadopsi oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dalam

Resolusinya Nomor 39/46 tanggal 10 Desember 1984 dan mulai diberlakukan pada tanggal 26 Juni 1987.

Pada pasal 7 dalam Konvensi ini mengatur dengan sangat jelas tentang perlindungan manusia dari ancaman penyiksaan yang dilakukan pihak lain sebagaimana bunyi pasal tersebut, *“Tidak seorangpun boleh dikenai penyiksaan, atau perlakuan atau hukuman yang keji, tidak manusiawi atau merendahkan martabatnya, khususnya tidak seorangpun, tanpa persetujuannya secara sukarela dapat dijadikan eksperimen medis atau ilmiah.”*⁷³

Adapun pandangan lain Komnas HAM terkait penerapan hukuman kebiri kimia bagi pelaku kekerasan seksual:⁷⁴

- a. Pemberian hukuman melalui pengebirian dapat dikualifikasikan sebagai penghukuman keji dan tidak manusiawi yang dengan demikian tidak sesuai dengan konstitusi dan komitmen Indonesia dalam bidang hak asasi manusia. Ketentuan pasal 28G ayat (2) UUD NRI 1945 yang menyatakan bahwa *“setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan dan perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia”*.
- b. Pemberian hukuman tambahan dengan pengebirian (baik kimiawi maupun operasi medis), dapat pula dikualifikasikan sebagai

⁷³ Nur Hafizal, Eko Soponyono, “Kebijakan Hukum Pidana Sanksi Kebiri Kimia dalam Perspektif HAM dan Hukum Pidana Indonesia”, *Jurnal magister hukum Udayana*, Vol.7, No.3, (2018) : 310, <https://ojs.unud.ac.id/index.php/jmhu>, diunduh pada tanggal 1 Juli 2020

⁷⁴ *Ibid*, 310-311.

pelanggaran hak yaitu pelanggaran hak atas persetujuan tindakan medis dan hak perlindungan atas integritas fisik dan mental seseorang.

- c. Masukan dari para dokter, ahli hukum, dan kriminologi menyatakan sebab kekerasan seksual bukan hanya bersifat medis namun juga psikologis dan social. Tindakan kekerasan seksual bukan hanya penetrasi alat kelamin semata. Dalam hal ini, selain hukuman berdasarkan Undang-Undang yang ada, yang harus diberikan adalah upaya pemulihan melalui rehabilitasi secara menyeluruh baik medis, psikologis, dan social dengan tetap berpedoman pada hak asasi manusia.⁷⁵
- d. Perppu tentang pemberian hukuman kebiri kimia sebaiknya dipertimbangkan dan dikaji kembali serta tidak diterbitkan. Komnas HAM memandang bahwa penanganan kejahatan seksual terhadap anak (dalam hal ini juga perempuan) meminta sebuah tindakan menyeluruh dan konsisten serta tidak hanya berpusat pada penghukuman namun juga rehabilitasi dan tindakan pencegahan seperti pengembangan system perlindungan social terhadap anak (misalnya komunitas ramah anak dan juga perempuan, keterbukaan informasi tentang para pelaku) ataupun melalui pendidikan, dan peningkatan pemahaman mengenai reproduksi. Hal ini dapat dilakukan dengan melaksanakan Inpres Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Gerakan Nasional Anti Kejahatan

⁷⁵ Arif, H, "Rekonstruksi Hukum Tentang Hukuman Kebiri Bagi Pelaku Tindak Pidana Pelecehan Seksual (Kajian Analisis Yuridis-Sosiologis Perppu No 1 Tahun 2016 Dalam Perspektif Kriminologi Hukum)". *Khazanah, Jurnal Studi Islam dan Humaniora*, Vol. 14, No.1, 9(2017) : 110-113, diunduh pada tanggal 1 Juli 2020

Seksual Terhadap Anak, instrument yang ada lainnya ataupun memperkuatnya.

Serupa dengan Komnas HAM, Institute For Criminal Justice Reforms (ICJR) juga sepakat mengatakan bahwa Hukuman kebiri kimia tidak cocok diteapkan di Indonesia. Hal tersebut didukung oleh data Laporan Rape World Statistic pada tahun 2012 yang menunjukkan bahwa hukuman kebiri bagi pelaku tindak pidana perkosaan di berbagai Negara yang telah menerapkan tidaklah efektif menimbulkan efek jera, dan tidak ada bukti eksplisit yang menjamin bahwa penggunaan kebiri kimia telah mengurangi jumlah kekerasan terhadap anak.⁷⁶ Data yang dijadikan rujukan tersebut menjadi salah satu hal yang mendasari penolakan hukuman kebiri kimia oleh ICJR.

Menurut ICJR, adapun alasan hukuman kebiri kimia sangat tidak cocok dengan konteks di Indonesia ialah:⁷⁷

- a. Intervensi kesehatan mental pada pelaku kejahatan seksual memerlukan penanganan berkelanjutan dan biaya yang harus dipersiapkan oleh pasie, psikiater, dan system kesehatan kejiwaan yang dicanangkan oleh Pemerintah. Sekali saja treatment terhadap pelaku tersebut berhenti, maka cara ini sangat bisa menjadi tidak efektif.

⁷⁶ Nuzul Qur'aini Mardiya. "Penerapan Hukuman Kebiri Kimia Bagi Pelaku Kekerasan Seksual", Pusat P4TIK Mahkamah Konsutitusi RI, Vol.14, No.1 dan Mardiya, N.Q.A. *Jurnal Konstitusi*, Vol.14, No.1, (2017) : 213-333. , <https://doi.org/10.31078/jk141110>, diunduh pada tanggal 2 Juli 2020

⁷⁷ Supriyadi Widodo, dkk, " *Menguji Euforia Kebiri* ", ..., 20-21.

- b. Perawatan medis yang digunakan dalam pengebirian melalui bahan kimia hanya dapat berfungsi selama pelaku yang dikebiri tersebut berada pada sebuah rezim yang tingkat kesukarelaan pasien dalam treatment medisnya dilakukan dengan baik dan teratur. Kepatuhan pasien tersebut sangatlah sulit, bahkan untuk memantau pengelolaan ARV untuk pengobatan HIV pun Indonesia masih masuk dalam kategori sulit melakukannya.
- c. Penanganan medis untuk pelaku kejahatan seksual hanya menguntungkan bagi sebagian kecil populasi masyarakat, karena sebagian besar pelaku merupakan kerabat dekat atau orang yang mengenal korban sehingga tingkat pelaporan dan penuntutan akan cenderung lebih minim, sehingga tidak mungkin bahwa pengobatan/penanganan medis pada kelompok individu tertentu akan berdampak pada Prevalensi dengan besar.
- d. Upaya untuk mengubah perilaku pada satu per satu individu memiliki hasil yang kurang signifikan. Komunitas dalam tingkat permasalahan masyarakat tertentu, perlu untuk membuat perubahan yang lebih luas dan berkelanjutan pada tingkat populasinya.
- e. Efek dari pengobatan pengebirian kimia yang jangka pendek sedangkan impuls seksual tetap berlanjut saat treatment, kemampuan pengobatan jangka panjang ini akan bergantung pada pengawasan secara ketat oleh tenaga professional untuk mengontrol efek tersebut.

- f. Kebiri kimia hanya cocok untuk orang yang didiagnosis sebagai gangguan mental, tidak cocok untuk pengobatan selain itu dan bagi orang yang telah kecanduan melakukan kekerasan seksual terhadap anak. Studi dari Indonesia sendiri bahwa Pedofilia melakukan tindakan kekerasan seksual terhadap anak bukan karena hasrat seksual utama melainkan hal-hal yang dikaitkan dengan korban pelecehan seksual pada masa anak-anak serta stigma bahayanya maskulinitas.
- g. Dari sudut pandang hak asasi manusia dan hak anak, pengebirian kimia membahayakan bagi hak individu dan integritas terhadap tubuh.

Argumen terkait diterbitkannya Perppu Nomor 1 Tahun 2016 tentang pengaturan hukuman kebiri kimia juga dikemukakan oleh Ikatan Dokter Indonesia (IDI) yang merupakan pangkal utama dalam pelaksanaan pengeksekusian hukuman tersebut. Ketua Majelis Kehormatan Etik Kedokteran (MKEK) Pusat, dr. Prijo Sidipratomo, Sp.Rad (K) mengatakan bahwa dokter Indonesia telah menolak menjadi eksekutor kebiri karena sangat bertentangan dengan kode etik. Sebagaimana sesuai dengan kode etik kedokteran, seorang dokter harus menjadi pelindung kehidupan sesuai dengan Pasal 11 Kode Etik Kedokteran. Hal lainnya yaitu seorang dokter dalam bertindak harus dengan inform consent atau persetujuan tindakan medis dari keluarga atau pasien itu sendiri.⁷⁸ Adapun secara umum terdapa

⁷⁸ Angga Kurniawan, "Analisis Hukuman Kebiri Terhadap Pelaku Pencabulan Anak Ditinjau Dari Tujuan Pidanaan", *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Lampung*, Vol.5, No.2, (2017) : 7, diunduh pada tanggal 16 Juni 2020

tiga asas alasan utama Ikatan Dokter Indonesia (IDI) menolak menjadi eksekutor kebiri, yaitu :⁷⁹

a. Asas Manfaat

Berdasarkan asas ini melakukan kebiri dianggap tidak memiliki manfaat sama sekali.

b. Asas jangan mencederai atau jangan merugikan (Prinsip ini menjadi penegasan dalam asas manfaat)

Asas ini berlaku pada segala aspek kehidupan, apabila direlevansikan pada hukuman kebiri kimia tentunya pelaku dalam hal ini sebagai pasien sangat dirugikan karena kehilangan hak berketurunan. Hak berketurunan merupakan hak ciptaan Tuhan, jika manusia menghalangibitu dengan paksa, maka sama saja menentang kehendak Tuhan.

c. Asas Otonomi

Mensyaratkan bahwa segala tindakan dokter wajib diketahui, disadari dan disetujui oleh pasien atau keluarganya. Kode etik yang menjadi rambu-rambu bagi kedokteran tersebut bersifat mengikat dan wajib dipatuhi bagi seluruh dokter yang telah membaca sumpah. Selain itu, factor sarana dan prasarana juga menjadi hambatan yang dinilai menjadi pertimbangan khusus bagi IDI dan hakim dalam menyetujui pelaksanaan hukuman kebiri kimia.

⁷⁹ *Ibid*, 13-14.

Perbedaan pendapat juga terjadi bukan hanya dikalangan masyarakat biasa ataupun birokrasi HAM dan kesehatan melainkan juga pada masyarakat yang beragama islam. Beberapa komunitas islam dan MUI di beberapa daerah juga menolak adanya pengaturan penetapan hukuman kebiri kimia tersebut. Hal tersebut dinilai menyalahi Hukum Islam yang dipercayai oleh orang muslim. Pengebirian adalah suatu tindakan yang dilarang oleh Rasulullah sebagaimana salah satu riwayat hadis berikut :

رَدَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى عُثْمَانَ بْنِ مَظْعُونٍ التَّبْتُ وَلَوْ أَذِنَ لَهُ
لَاخْتَصَيْنَا⁸⁰

“Rasulullah sallallahu‘alaihi wasallam tidak mengizinkan ‘Utsman bin Mazh’un untuk tabattul (hidup membujang), kalau seandainya beliau mengizinkan tentu kami (akan bertabattul) meskipun (untuk mencapainya kami harus) melakukan pengebirian.”
(HR. Bukhari no. 5073 dan Muslim no. 1402)

Akan tetapi, Ketua Komisi Dakwah dan Pengembangan Masyarakat Majelis Ulama Indonesia (MUI), KH. Cholil Nafis mengatakan bahwa pemberian hukuman kebiri pada terpidana Pedofilia bisa memberikan efek jera yang biasa disebut sebagai *zawajir* dalam hukum islam. Hakim disini juga boleh berijtihad dalam memberikan hukuman tersebut dengan pertimbangan *zawajir* tadi. Menurut beliau, penerapan hukuman kebiri ini diserahkan sepenuhnya kepada Hakim yang akan memutus perkara akan dilaksanakan hukuman kebiri kimia tersebut atau tidak, karena seorang

⁸⁰ Hadist Bukhari dan Muslim”, pratinjau melalui <https://tafsirq.com/> diunduh pada tanggal 30 April 2020

hakim lah yang memiliki wewenang dalam menentukan *al-hukm*. Apabila hakim merasa perlu memberikan hukuman kebiri tersebut, maka hukuman tersebut haruslah dilaksanakan karena pada *hukum ta'zir* penentuan vonis sepenuhnya ada pada seorang hakim. Pendapat lain juga diberikan oleh Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Jawa Barat, KH. Rachmat Safe'I yang menganggap bahwa kebiri kimia itu diperbolehkan selama hal tersebut tidak bersifat permanen, karena jika kebiri kimia tersebut sifatnya permanen maka akan mengganggu hak asasi manusia dan kehormatan manusia yang dijunjung dalam hukum islam.⁸¹

Tidak hanya itu, kritisi terhadap Penerbitan dan Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2016 yang didalamnya memuat aturan penghukuman kebiri kimia ini juga diberikan oleh sejumlah birokrasi pendidikan, khususnya perguruan tinggi. Seperti yang tertulis pada buku “Menguji Euforia Kebiri” yang juga diterbitkan bersama Masyarakat Pemantau Peradilan Fakultas Hukum Universitas Indonesia (Mappi FH UI), Guru Besar Hukum Pidana Fakultas Hukum di Universitas Indonesia, Harkristuti Harkrisnowo mengatakan opininya terkait dengan hukuman kebiri kimia tersebut. Menurutnya, hukuman tersebut bisa jadi salah sasaran dan dikhawatirkan menjadi boomerang, beliau mengatakan bahwa pelaku kekerasan seksual seringkali dianggap memiliki *abnormal sex drive* atau libido seks yang tinggi dan dengan dorongan yang tidak normal, padahal

⁸¹ Wahyudi, “Kebiri Kimiawi Dalam Perspektif Hukum Islam”, *Jurnal Istimbath*, Vol.16, No.2, (2019) : 243-244, diunduh pada tanggal 3 Juli 2020

belum tentu semua kasus kekerasan seksual dilakukan oleh pelaku yang memiliki *abnormal sex drive*.⁸²

Argument lainnya juga dikemukakan oleh beberapa dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung dalam buku terbitan Tim Diskusi Dosen Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung yang berjudul “Hukuman Kebiri Dalam Kajian Fikih Modern Interdisipliner”, diantaranya ialah :

a. Dr. Alamsyah, S.Ag, M.Ag.

Dalam diskusi Dosen Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung, beliau memaparkan bahwa meskipun hukuman kebiri kimia tidak diatur dalam Al-Qur'an dan Hadis Nabi, namun hukuman kebiri kimia ini dapat diterima dalam Islam sebagai bentuk *Ijtihad Empiris* dalam upaya pencegahan terjadinya tingkat kekerasan seksual, beliau juga mengungkapkan bahwa sebagai system yang terbuka, dialektis dan memperjuangkan nilai kemanusiaan, syari'at Islam dapat mengakomodir Hukuman Kebiri Kimia ini sebagai salah satu bentuk hukuman pidana *ta'zir* atau hukuman tambahan pemberatan.⁸³

b. Dr. H. Khairudin, M.H.

Dalam tema diskusi beliau yaitu “Pengaturan Hukuman Kebiri Dalam Perspektif Politik Hukum”, beliau memparkan argumennya bahwa Hukuman Kebiri Kimia yang diatur dalam Perppu Nomor 1

⁸² Surpiyadi Widodo, dkk, *Menguji Euforia Kebir*”, ..., 7.

⁸³ Tim Diskusi Dosen Fakultas Syari'ah, *Hukum Kebiri Dalam Kajian Interdisipliner*, (Surabaya : CV. GEMILANG, 2018), 23.

Tahun 2016 sebagai langkah responsive merupakan langkah yang tepat dan dibenarkan secara yuridis dikarenakan tidak terlihatnya efek jera yang ditimbulkan dari pengaturan hukuman yang telah diatur di Undang-Undang sebelumnya. Menurut beliau, ada hal menarik lainnya dalam penerbitan Perppu Nomor 1 Tahun 2016 ini karena tidak hanya melihat dari segi paradigma positivistic melainkan pemerintah juga melihat dari paradigma hukum progresif atau responsive, yang tidak hanya aspek kepastian hukum saja yang menjadi bahan pertimbangan melainkan ada aspek esensial lain yaitu aspek keadilan dan kemanfaatan lahirnya suatu perundang-undangan.⁸⁴

c. Dr. Iskandar Syukur, M.A.

Menurut hasil pemaparan beliau dalam diskusi Dosen Fakultas Syariah yang dituangkan dalam Buku Hukuman Kebiri Perspektif Fikih Modern Interdisipliner, beliau mengungkapkan bahwasanya adanya Perppu Nomor 1 Tahun 2016 ini menjadi salah satu jaminan amanat UUD 1945 terhadap perlindungan hak anak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta terhadap perlindungan hak anak dari kekerasan dan diskriminasi. Beliau juga mengatakan bahwa hukuman kebiri kimia tersebut merupakan kebijakan pemerintah sebagai bentuk masalah serta sebagai upaya menegakkan keadilan komutatif yaitu keadilan yang memberikan kompensasi yang memadai

⁸⁴ *Ibid*, 44.

bagi korban kekerasan seksual dan memberikan hukuman yang setimpal kepada pelaku oleh hakim.⁸⁵

d. Dr. Hj. Dewani Romli, M.Ag.

Beliau menyampaikan argumennya dalam Diskusi Dosen Fakultas Syariah dengan menggunakan tema perspektif Komnas Perempuan, beliau menilai bahwa hukuman kebiri apabila dilihat dari syari'at islam tetpa hukumnya adalah haram dan menurutnya, hukuman kebiri tidak menyelesaikan akar dari kejahatan kekerasan anak dan tidak sesuai dengan system pemidanaan Indonesia . beliau juga memparkan bahwa komnas perempuan menyayangkan hukuman ini karena dinilai keji dan tidak manusiawi, hukuman ini dikhawatirkan hanya sebagai wujud respons desakan emosional public saja.⁸⁶

e. Dr. H. Muhammad Rosfi, M.Ag.

Beliau memandang hukuman kebiri tidak sesuai dengan hukum syari'at Islam dan penerapannya termasuk dosa besar karena Pedofilia dapat dikategorikan zina maka hukuman zina sudah ditetapkan oleh nash Al-Qur'an. Hukuman kebiri juga dinilai tidak menyentuh tujuan hukum syari'at terutama dalam hal kemaslahatan umat, karena hukum yang diberikan hanya dirasakan pada yang menjalani saja dan tidak Nampak pada orang lain.⁸⁷

⁸⁵ *Ibid*, 60-61.

⁸⁶ *Ibid*, 85-86.

⁸⁷ *Ibid*, 130-131.

f. Dr. Hj. Zuhraeni, S.H., M.H.

Beliau mengkritisi hukuman kebiri kimia dalam perspektif Hak Asasi Manusia seperti organisasi lainnya, menurut beliau hukuman kebiri kimia yang ditetapkan dalam Perppu Nomor 1 Tahun 2016 merupakan kebutuhan hukum yang sangat mendesak untuk ditegakkan, dan tidak menentang Hak Asasi Manusia. Opini public terkait hukuman ini menurutnya cenderung mementingkan Hak Asasi Pelaku tetapi mengabaikan Hak Asasi anak dalam hal ini sebagai korban. Hukuman kebiri yang dijatuhkan merupakan langkah tepat karena pelaku telah merebut hak asasi korban secara paksa dan merebut masa depannya.⁸⁸

g. Dr. H.A. Khumaidi Ja'far, S.Ag., M.H.

Menurut syari'at islam dan para ulama sudah jelas hukuman kebiri tergolong haram, beliau juga sependapat akan hal tersebut karena meskipun kebiri ini dilakukan secara kimia tetpa saja akan menimbulkan cirri-ciri fisik seperti perempuan bagi laki-laki dan hal tersebut sangat jelas hukumnya haram dalam hukum islam, beliau juga mengungkapkan bahwa kebiri kimia juga dinilai tidak efektif karena dampak yang ditimbulkan dari kebiri kimia cukup banyak seperti tulang keropos, diabtets, penuaan dini bahan penyakit jantung.⁸⁹

h. Marwin, S.H., M.H.

Menurut beliau, efektivitas hukuman kebiri kimia ini sangat bergantung kepada hubungan sinergi antara factor-faktor penegakan

⁸⁸ *Ibid*, 152-153.

⁸⁹ *Ibid*, 161.

hukum yaitu, factor perundang-undangan (Perppu) itu sendiri, factor aparat penegak hukum, factor sarana dan prasarana, dan factor budaya hukum masyarakat.⁹⁰

i. Abdul Qodir Zaelani, S.H.I., M.A.

Menurutnya terdapat beberapa hal yang harus direnungkan dalam penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2016 yang mengatur tentang hukuman kebiri kimia tersebut yaitu *Pertama*, akan menjadi pertentangan terhadap asas-asas pemidanaan yang berlaku dan KUHP, karena KUHP hanya mengenal hukuman pidana pokok dan tambahan sedangkan hukuman kebiri tergolong sebagai *corporal punishment* atau hukuman terhadap badan yang tidak diatur dalam KUHP. *Kedua*, hukuman kebiri kimia ini tidak bisa menjamin berakhirnya tindakan kekerasan seksual terhadap anak. *Ketiga*, persoalan kekerasan seksual bukan hanya tentang kekerasan karena alat kelamin melainkan pola pikirnya juga, apabila kelaminnya dikebiri kimia tetapi pola pikirnya masih seperti pelaku maka tidak akan mengindahkan apapun. *Keempat*, siapa yang berhak untuk menyuntik kebiri, jaksa atau dokter? Karena IDI jelas menolak untuk menjadi pelaksana kebiri kimia tersebut.⁹¹

⁹⁰ *Ibid*, 183.

⁹¹ *Ibid*, 210-211.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU-BUKU

- A. Djazuli, *Fiqh Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syariah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013)
- Abdul Hayy Abdul 'Al, *Pengantar Ushul Fiqh*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2014)
- Abdurrahman Soejono, *Metode Penelitian*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2005)
- Adensi Timomor Dan Wenly R J Lolong, *Penanggulangan Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak*, (Surabaya : Ikatan penerbit Indonesia, 2018)
- Ahmad Musthafa Ibrahim, “*Mu'zamil Washit*”, (Darun Nasyr: Daud Da'wah)
- Al-Hafidz W. Ahsin, *Fikih Kesehatan*, (Jakarta : AMZAH, 2010)
- Al-Qardhawy Yusuf, *Fiqh Daulah dalam Perspektif Al-Qur'an dan Sunnah*, Terj. Kathur Suhardi, (Jakarta : Pustaka Al-Kautsar, 1997)
- Asy-Syal Abdul Hadi, *Islam Membina Masyarakat Adil Makmur*, Terj. Anshori Umar Sitanggal, (Jakarta : Pustaka Dian, 2006)
- Azhary Muhammad Tahir, *Beberapa Aspek Hukum Tata Negara, Hukum Pidana dan Hukum Islam*, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2015)
- Djubaedah Neng, *Perzinaan Dalam Peraturan Perundang-Undangan Diindonesia Ditinjau Dari Hukum Islam*, (Jakarta: Kencana Prenadia Media Group, 2010)
- Erwin Rudi, *Kamus Hukum*, (Jakarta: Sinar Garfika, 2000)
- Hasan Shiddiq Muhammad, “*Ensiklopedia Hadist*”, (Jakarta: Hikmah, 2009)
- Hermawan Iwan, *Ushul Fiqh: Metode Kajian Hukum Islam*, (Kuningan: Hidayatul Al-Qur'an, 2019)
- Ibrahim Johny, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, (Malang: Banyumedia Publishing, 2006)

- Imam Muslim, *Kitab Shahih Muslim*, (Makassar: Maktabah Fayyadh)
- Imron Ali, *Manajemen Peserta Didik Berbasis Sekolah*, (Jakarta: PT Bumi Askara, 2012)
- Indrakusuma Amier Daien, *Pengantar Ilmu Pendidikan*, (Surabaya: Usaha Nasional, 1973)
- Jauhar Ahmad Al Mursi Husain, *Maqashid Syariah*, Terj. Khikmawari, (Jakarta: AMZAH, 2018)
- John M. Echole dan Hasan Shadily, *Kamus Inggris Indonesia*, (Jakarta : Gramedia, 1996)
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, (Jakarta : Bhuana Ilmu Populer, 2019)
- Khallaf Abdul Wahab, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2012)
- Maimun, *Ushul Fiqh II : Metode Penemuan Hukum Dan Impelentasinya*, (BandarLampung: Anugraha Utama Raharja, 2019)
- Mardani, *Bunga Rampai Hukum Aktual*, (Jakarta : Penerbit Ghalia Indonesia, 2009)
- Marzuki Mahmud Peter, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011)
- Muhammad Abdulkadir, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bhakti, 2004)
- Muhammad Baqi Abdul Fu'ad, *Shahih Bukhari Muslim*, (Jakarta : PT Elex Media Komputindo, 2017)
- Nurhayati, Sinaga Imran Ali, *Fiqh dan Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2018)
- Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
- Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 70 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Tindakan Kebiri Kimia, Pemasangan Alat Pendeteksi Elektronik, Rehabilitasi serta Pengumuman Identitas Pelaku Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak

- Prodjodikoro Wirjono, *Asas-Asas Ilmu Negara dan Politik*, (Bandung: PT. Eresco, 2008)
- Purwanti M. Ngalim, *Ilmu Pendidikan Teoritis dan Praktis*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2006)
- S. Priyanto dan Ananda S. , *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, (Surabaya : Kartika Putra Press, 2010)
- Salim Abdul Muin, *Fiqh Siyasah Konsepsi Kekuasaan Politik Dalam Al-Qur'an*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2010)
- Shiddieqy Ash Hasbi, *Asas-Asas Hukum Tata Negara Menurut Syariah*, (Jakarta: Matahari Masa, 2009)
- Shiddiq Sapiudin, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017)
- Susiadi AS, *Metode Penelitian*, (Bandar Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M IAIN Raden Intan Lampung, 2015)
- Syarif Ibnu Majar, Zada Khammi, *Fiqh Siyasah: Doktrin dan Pemikiran Politik Islam*, (Jakarta: Erlangga, 2009)
- Syarifuddin Amir, "*Ushul Fiqh*", (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2018)
- _____, *Garis-Garis Besar Fikih*, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2013)
- Tim Diskusi Dosen Fakultas Syari'ah, *Hukum Kebiri Dalam Kajian Interdisipliner*, (Surabaya : CV. GEMILANG, 2018)
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
- Waridah Ernawati, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta :Bnmedia, 2017)

Widodo Supriyadi, dkk, “*Menguji Euforia Kebiri : Cetakan Krisis Atas Rencana Kebijakan Kebiri Bagi Pelaku Kejahatan Seksual Anak Di Indonesia*”, (Jakarta: Institute For Criminal Justice, 2016)

Wachjoe Santhos, *Hukuman Kebiri Bagi Pelaku Pedofilia, Suatu Tinjauan Yuridis Sosiologis*, (Jakarta: IKAHI, 2015)

Yasid Abu, *Fiqh Realitas*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2005)

_____, *Logika Ushul Fiqh*, (Yogyakarta: IRCiSoD, 2019)

Yaswirman, *Hukum Keluarga*, (Jakarta: Pt Raja Grafindo Persada, 2013)

JURNAL (ON-LINE)

Alit Kurniasari, Yurika Fauzia Wardhani, “Pedofilia Sebagai Ancaman Tersembunyi Bagi Anak”, Volume 2, No3, (2016), diunduh pada tanggal 14 Juni 2020

American Phsychiatric Association, “*Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders*”, (Washington DC : American Psyciatric Publishing, 5th Edition, 2013), diunduh pada tanggal 16 Juni 2020

Angga Kurniawan, “Analisis Hukuman Kebiri Terhadap Pelaku Pencabulan Anak Ditinjau Dari Tujuan Pemidanaan”, *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Lampung*, Vol.5, No.2, (2017), diunduh pada tanggal 16 Juni 2020

Arif, H, “Rekonstruksi Hukum Tentang Hukuman Kebiri Bagi Pelaku Tindak Pidana Pelecehan Seksual (Kajian Analisis Yuridis-Sosiologis Perppu No 1 Tahun 2016 Dalam Perspektif Kriminologi Hukum)”. *Khazanah, Jurnal Studi Islam dan Humaniora*, Vol. 14, No.1, 9(2017), diunduh pada tanggal 1 Juli 2020

Bahrudin Zamawi, “Aplikasi Teori Fungsi Interpretasi Jorge J.E Gracia Hadith Kebiri”, *Maraji Jurnal Ilmu Keislaman*, Vol. 2, No. 2, (2016), diunduh pada tanggal 30 Agustus 2020

Fitri Wahyuni, “Hukuman Kebiri Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pemerkosaan Anak Dan Kaitannya Dengan Hak Asasi Manusia”, *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol.6, No.2, (2017) , diunduh pada tanggal 1 Juli 2020

Florida State Law Review, *Chemical Castration Law: A Return to the Dark Ages*, Number 25, Florida’s 1997.

- Fuadi, M. Anwar, "Dinamika Psikologis Kekerasan Seksual : Sebuah Studi Fenomenologi", *Jurnal Psikologi Islam-Psikoislamika*, Vol. 8, No.2, (2011), diunduh pada tanggal 12 Juni 2020
- John Willey and Sons,, "Chemical Castration And Anti-Androgens Induce Differential Gene Expression", *Journal Of Pathology University Of Tampere*, (2012), diunduh pada tanggal 30 Agustus 2020
- Junita B. Mokale, "Pedofilia Sebagai Salah Satu Bentuk Kejahatan Kekerasan Seksual Terhadap Anak", *Lex Crimen*, Volume II, No.5, (2013), diunduh pada tanggal 9 Juni 2020
- Kevin Setiawan, Aji Wibowo, "Analisis penerapan penjatuhan sanksi tindakan kebiri kimia dari sudut pandangan hak asasi manusia pelaku dan korban", *Jurnal Hukum Adigama*, Vol 2, no. 1, (2019), diunduh pada tanggal 30 April 2020
- Maslahatul Azizah, "Sanksi Kebiri Kimia Bagi Pemerkosa Anak Perspektif Masalah Mursalah", *Al-Jinayah : Hukum Pidana Islam*, Vol.3, No.2, (2017), diunduh pada tanggal 20 Juni 2020
- Mohammad Rusfi, "Validitas Masalah Mursalah Sebagai Sumber Hukum", *Jurnal Al-Adalah Fakultas Syariah*, Vol.12, No.1, (2014), diunduh pada tanggal 4 September 2020
- Mutiara Fahmi, "Prinsip Dasar Politik Hukum Islam Dalam Persepektif Al-Qur'an", *Jurnal Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry*, Vol. 2, no. 1, (2017), diunduh pada tanggal 2 Mei 2020
- Nur Hafizal, Eko Soponyono, "Kebijakan Hukum Pidana Sanksi Kebiri Kimia dalam Perspektif HAM dan Hukum Pidana Indonesia", *Jurnal magister hukum Udayana*, Vol.7, No.3, (2018), diunduh pada tanggal 1 Juli 2020
- Nuzul Qur'aini Mardiya. "Penerapan Hukuman Kebiri Kimia Bagi Pelaku Kekerasan Seksual", Pusat P4TIK Mahkamah Konsutitusi RI, Vol.14, No.1 dan Mardiya, N.Q.A. *Jurnal Konstitusi*, Vol.14, No.1, (2017), diunduh pada tanggal 2 Juli 2020
- Toha Andiko, "Pemberdayaan Qawa'id Fiqqiyah Dalam Penyelesaian Masalah-Masalah Fiqh Siyasah Modern", *Jurnal Al-'adalah*, Vol.12, No.1, (2014), diunduh pada tanggal 2 Mei 2020
- Wahyudi, "Kebiri Kimiawi Dalam Perspektif Hukum Islam", *Jurnal Istinbath*, Vol.16, No.2, (2019), diunduh pada tanggal 3 Juli 2020

SKRIPSI/TESIS

Dirga Santosa, “Tinjauan Hukum Islam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPPU) Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Hukuman Kebiri Kimia”, (Skripsi: UIN Raden Intan Lampung, Lampung, 2017)

Madnur, “Sanksi Kebiri Di Indonesia Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Perlindungan Anak”, (Tesis : Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2019)

Regia Vandra, ”Pemaknaan Kaum Ibu Terhadap Kasus Pedofilia”, (Tesis, Jakarta : Universitas Indonesia, 2015)

Safyan ilyas, “Sanksi Kebiri Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Pidana Indonesia”, (Tesis: Institut Agama Islam Negeri Bengkulu, Bengkulu, 2018)

ARTIKEL (ON-LINE)

“Hadist Bukhari dan Muslim”, pratinjau melalui <https://tafsirq.com/> diunduh pada tanggal 30 April 2020

“Hadist Sunan An-Nasa’I Kitab Pernikahan”, dalam *Hadist.id*, <https://www.hadits.id/hadits/nasai/3163>, diunduh pada tanggal 28 Agustus 2020

Andi Misbabul Pratiwi, “Perlukah Hukuman Kebiri Pelaku Kekerasan Seksual”, dalam *Jurnal perempuan.org*, November 5, 2015, <https://www.jurnalperempuan.org/warta-feminis/perlukah-hukuman-kebiri-pelaku-kekerasan-seksual>, diunduh pada tanggal 16 Juni 2020

Anwar, “Kasus Babe Kejahatan Paling Mengerikan Di Indonesia”, dalam *Detik.com*, Februari 1, 2010, <https://news.detik.com/berita/d-1290530/kasus-babe-kejahatan-paling-mengerikan-di-indonesia>, diunduh pada tanggal 15 Juli 2020

Bayu Dwi Mardana, “Kisah Unik Kebiri Dalam Sejarah Panjang Peradaban Manusia”, dalam *Fotokita*, Agustus 27, 2019, <https://fotokita.grid.id/amp/111831458/>, diunduh pada tanggal 18 Juni 2020

Bella Jufita Putri, “Sekilas Sejarah dan Fakta Hukuman Kebiri”, dalam *Tribunnews.com*, Mei 26, 2016, <https://www.liputan6.com/health/read/2516594/sekilas-sejarah-dan-fakta-hukuman-kebiri>, diunduh pada tanggal 18 Juni 2020

- Bestari Kumala Dewi, “Ini Efek Hukuman Kebiri Kimiawi Pada Tubuh”, dalam *Kompas.com*, Mei 2016, <https://health.kompas.com/read/2016/05/25/200500123/>, diunduh pada tanggal 16 Juni 2020
- Evy Rachmawati, “Sisi Kelam Pariwisata Di Pulau Dewata”, dalam *Kompas.com*, Mei 9, 2018, <https://www.kompas.com/kompascetak/0509/28/humaniora/2083218.htm> diunduh pada tanggal 9 Juni 2020
- Darko Stojavonic, “Dua Vonis Hukuman Kebiri Kimia Di Jawa Timur”, dalam *Liputan6.com*, November 20, 2019, <https://m.liputan6.com/surabaya/read/4115224>, diunduh pada tanggal 1 Juli 2020
- Demon Fajri, “Ini Kronologi Pemerksaan Yuyun di Bengkulu”, dalam *Okezone.com*, Mei 04, 2016, <https://news.okezone.com/read/2016/05/04/340/1380243/ini-kronologi-pemerksaan-yuyun-di-bengkulu>, diunduh pada tanggal 30 Juni 2020
- Eliando Simamarta, “Kepala Sekolah Perlihatkan ‘Belalainya’ Di depan Siswi”, dalam *Sindonews.com*, Januari 21, 2016, <https://daerah.sindonews.com/berita/1079038/191/edan-kepala-sekolah-sd-perlihatkan-belalainya-di-depan-siswi>, diunduh pada tanggal 30 Juni 2020
- Faisal Irfani, “Kasus Robot Gedek : Konspirasi atau Memang Aksi Keji”, dalam *Tirto.id*, Oktober 15, 2018, <https://tirto.id/kasus-robot-gedek-konspirasi-atau-memang-aksi-keji-c6yX>, diunduh pada tanggal 15 Juli 2020
- Faisyal, “Membedah Praktik Kebiri Untuk Predator Seksual Di Dunia”, dalam *CNN Indonesia*, Agustus 29, 2019, <https://m.cnnindonesia.com/internasional/20190828210214-106-425545/membedah-praktik-kebiri-untuk-predator-seksual-di-dunia>, diunduh pada tanggal 16 Juni 2020
- Gloria Setvani Putri, “Mengenal kebiri kimia, hukuman bagi pelaku perkosaan”, dalam *Kompas.com*, Agustus 26, 2019, <https://kompas.com/sains/read/2019/08/26/112402523/mengenal-kebiri-kimia-hukuman-bagi-pelaku-perkosaan> diunduh pada tanggal 30 April 2020
- Harry Siswoyo, “Pedofil Anak Asal Australia Di Ringkus Di Bali”, dalam *Viva.co.id*, Januari 12, 2016, <https://www.viva.co.id/amp/read/721799-pedofil-anak-asal-australia-diringkus-di-bali>, diunduh pada tanggal 30 Juni 2020

- Hasil wawancara Hasanudin AF pada surat kabar harian republika, dalam *Republika.co.id*, Mei 16, 2017, <https://republika.co.id/berita/nasional/jabodetabek-nasional/16/05/17-> diunduh pada tanggal 30 April 2020
- Insan Medika, “Mengetahui hukuman kebiri kimia permanen dan kebiri kimia beserta dampaknya pada kesehatan”, dalam *Insanmedika*, Januari 20, 2016, <https://blogs.insanmedika.co.id/hukum-kebiri-adalah/> diunduh pada tanggal 30 April 2020
- Johny Simatupang, “Bawa Kabur dan Setubuhi ABG, Pemuda Ini Terancam 15 Tahun Penjara”, dalam *Sindonews.com*, Februari 19, 2016, <https://daerah.sindonews.com/berita/1086747/191/bawa-kabur-dan-setubuhi-abg-pemuda-ini-diancam-15-tahun-penjara/>, diunduh pada tanggal 30 Juni 2020
- KPAI, “Rincian Data Kasus Berdasarkan Klaster Perlindungan Anak”, dalam *Kpai.go.id*, Juli 17, 2016, <https://bankdata.kpai.go.id/tabulasi-data/data-kasus-per-tahun/rincian-data-kasus-berdasarkan-klaster-perlindungan-anak-2011-2016>, diunduh pada tanggal 1 Agustus 2020
- Laila Rahmawati, “KPAI : Suntik Kebiri Hukuman Tepat Bagi Pedofil”, dalam *Kompas.com* Mei 10, 2014, <https://regional.kompas.com/read/2014/05/10/1918569/KPAI>, diunduh pada tanggal 1 Juli 2020
- Lis Yuliani, “Guru SMP di Manggarai Cabuli Siswanya”, dalam *Viva.co.id*, Maret 18, 2016, <https://www.viva.co.id/berita/metro/749478-guru-smp-di-manggarai-diduga-tiga-kali-cabuli-siswanya?>, diunduh pada tanggal 30 Juni 2020
- Riva Desthania Suastha, “Riwayat Hukum Perlindungan Anak Indonesia”, dalam *CNNIndonesia*, Mei 26, 2016, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20160526155355-12-133626/riwayat-hukum-perlindungan-anak-di-indonesia>, diunduh pada tanggal 15 Juli 2020
- Riyan Ferdianto, “2016 tahun darurat nasional kejahatan seksual anak”, dalam *Med.com* (Jakarta, 2016), <https://m.medcom.id/amp/1bVY2gaN-2016-tahun-darurat-nasional-kejahatan-seksual-anak>, diunduh pada tanggal 30 April 2020
- Satgas Perlindungan Anak, “Mengajari Kewaspadaan Kekerasan Seksual Pada Anak”, dalam *Idai*, Juni 3, 2014, <https://www.idai.or.id/artikel/seputar-kesehatan-anak/mengajari-kewaspadaan-kekerasan-seksual-pada-anak>, diunduh pada tanggal 15 Juli 2020

Silvia Galikano, “Kebiri, Praktik Kuno Yang Tetap Kontroversial”, dalam *CNN INDONESIA*, Februari 02, 2016, <https://www.cnnindonesia.com/gaya-hidup/20160204152302-255-108907/kebiri-praktik-kuno-yang-tetap-kontroversial>, diunduh pada tanggal 18 Juni 2020

Suryanto, “Metode Kebiri Menurut Dokter”, dalam *Anataranews.com*, Oktober 21, 2015, <https://www.antaranews.com/berita/524780/begini-metode-kebiri-menurut-dokter>, diunduh pada tanggal 16 Juni 2020

Syamsi Huda, “Dpr dukung hukuman kebiri”, dalam *Merdeka.com*, September 8, 2016, <https://m.merdeka.com/peristiwa/dpr-dukung-hukum-kebiri>, diunduh pada tanggal 30 April 2020

Thamiep, “Definisi Pedofilia”, dalam *Id.Scribd*, Juli 10, 2015, <https://id.scribd.com/doc/94107015/Definisi-Pedofilia-pedofil>, diunduh pada tanggal 29 April 2020

Wawan Setiawan, “Hukum Kebiri Bagi Pedofilia”, dalam *Andalas 12*, April 25, 2016, <https://andalasidea12.blogspot.com/2016/04/hukum-kebiri-bagi-Pedofilia.html/?m=1>, diunduh pada tanggal 16 Juni 2020

Yudistira Imandiar, “Peluru kebiri untuk predator”, dalam *Detik.com*, Juni 9, 2016, <https://news.detik.com/x/detail/investigasi/20160609/peluru-kebiri>, diunduh pada tanggal 30 April 2020

Zaenuddin, “Pengertian Hukuman Kebiri Dalam Islam, Jenis dan Menurut Para Ahli”, dalam *Artikel Siana*, September 15, 2020, <https://artikelsiana.com/pengertian-hukuman-kebiri-dalam-islam-jenis-menuru-para-ahli>, diunduh pada tanggal 16 Juni 2020

Zaki Mubarak, “Selain Indonesia, ini negara yang telah menerapkan hukuman kebiri kimia untuk para pedofil”, dalam *Serambinews.com*, Agustus 26, 2019, <https://aceh.tribunnews.com/amp/2019/08/26->, diunduh pada tanggal 30 April 2020

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 70 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Tindakan Kebiri Kimia, Pemasangan Alat Pendeteksi Elektronik, Rehabilitasi serta Pengumuman Identitas Pelaku Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak